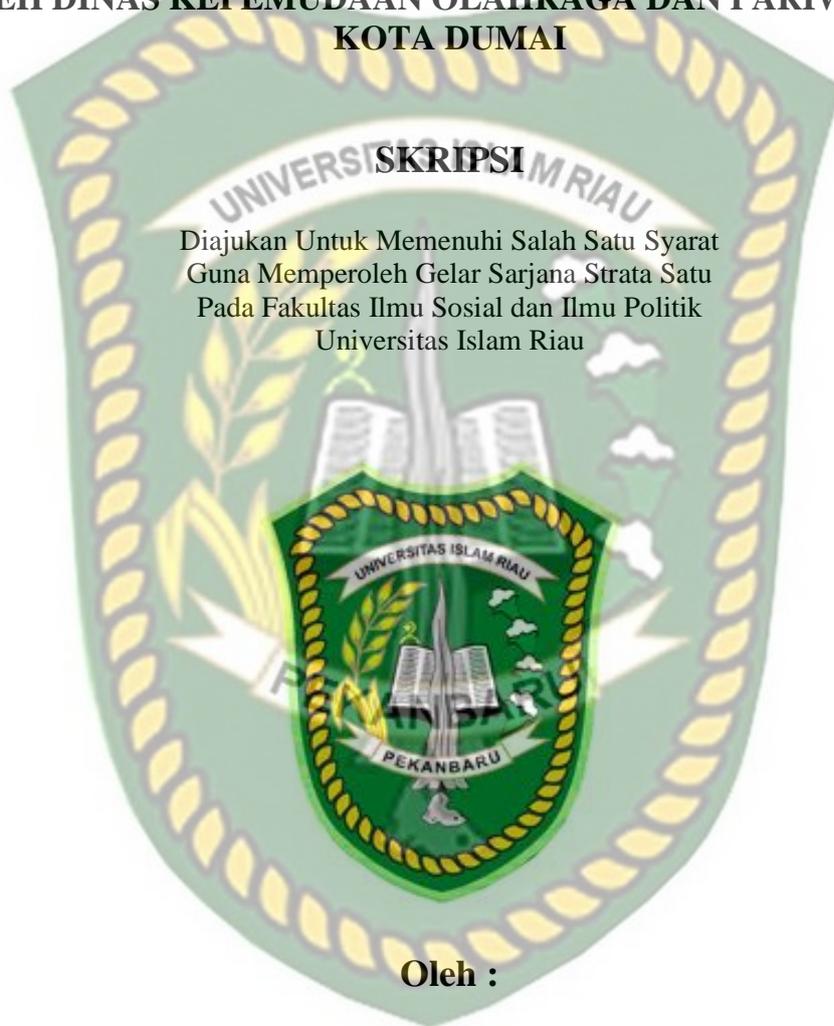


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BANDAR BAKAU
OLEH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

Roja Maulana Ibrahim
NPM : 177310383

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

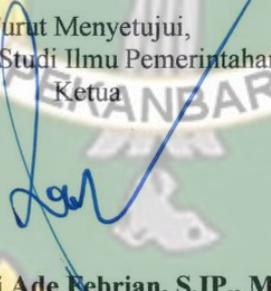
Nama : Roja Maulana Ibrahim
NPM : 177310383
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota
Dumai

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Roja Maulana Ibrahim
NPM : 177310383
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar
Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Dumai

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si


Budi Muliarto, S.IP., M.Si

Anggota


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Roja Maulana Ibrahim
NPM : 177310383
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota
Dumai

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris

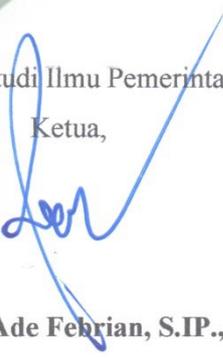

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan

- kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimbailmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
 3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan kampus.
 4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP. M.Si, selaku Dosen Pembimbing saya mengucapkan terimakasih yang telah memberikan masukan atau sarannya kepada saya agar penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik
 6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
 7. Ibu kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.

8. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai beserta staf dan pegawai yang telah mempermudah saya untuk memperoleh data-data yang saya butuhkan selama penelitian.
9. Terkhusus dan istimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat saya sayangi terimakasih atas doa-doanya yang selalu menyertai langkah-langkah anaknya ini selalu menyemangati saya dalam hal terbaik untuk saya kedepannya Keluarga adalah Sumber Kekuatan saya sampai di titik ini.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

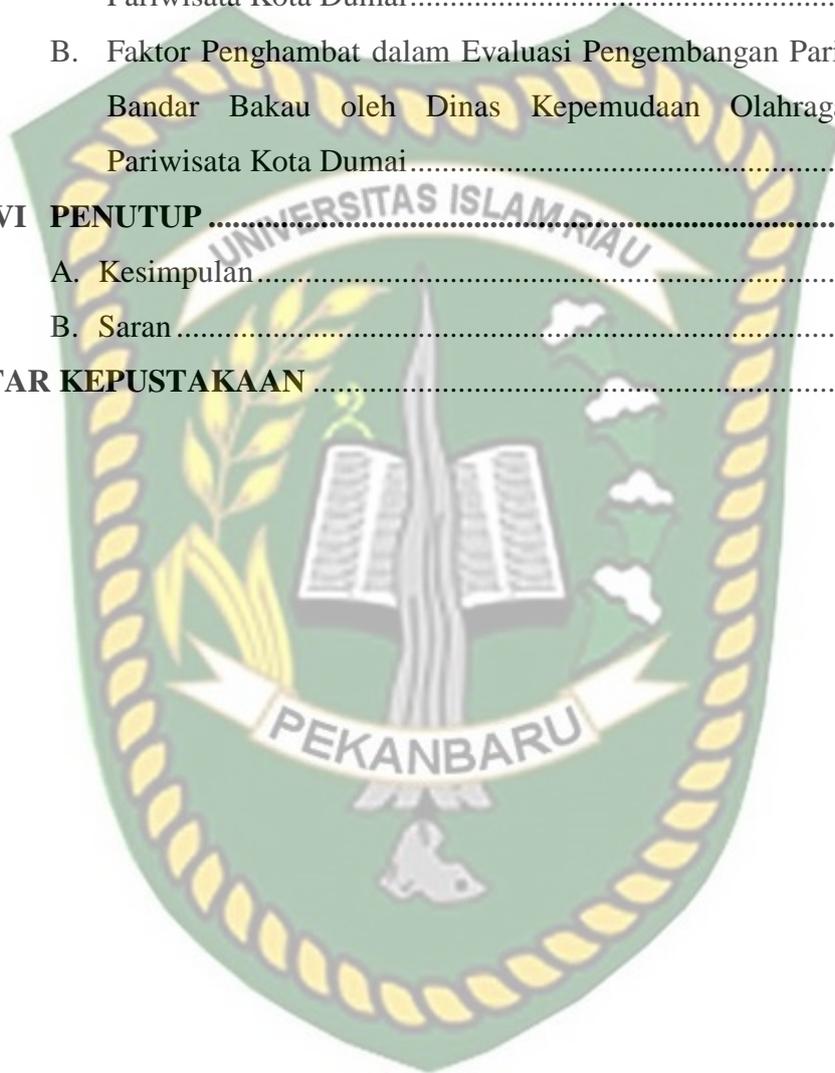
Penulis,

Roja Maulana Ibrahim

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	51
C. Kerangka Pikir.....	53
D. Konsep Operasional	54
E. Operasional Variabel.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Informan	58
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	60
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	61
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum Penduduk Kota Dumai.....	62
B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai.....	68

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
	A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.....	79
	B. Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.....	109
BAB VI	PENUTUP	116
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Saran	116
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Jenis dan Nama Objek Wisata di Kota Dumai.....	5
I.2. Jumlah pengunjung Bandar Bakau Kota Dumai Tahun 2016 – 2020..	10
I.3. Fasilitas Di Bandar Bakau Kota Dumai	10
II.1. Kriteria Evaluasi.....	38
II.2. Penelitian Terdahulu	52
II.2. Operasional Variabel Mengenai Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	56
III.1. Jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	61

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roja Maulana Ibrahim
NPM : 177310383
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Pelaku Pernyataan,



Roja Maulana Ibrahim

EVALUASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BANDAR BAKAU OLEH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

Oleh :
Roja Maulana Ibrahim

Kota Dumai memiliki kawasan hutan mangrove Bandar Bakau yang tercatat dengan luas 31 Ha. Kawasan Bandar Bakau Dumai ini lokasinya sangat strategis, dekat dengan pusat kota, jalan menuju lokasi sudah bagus sehingga aksesnya mudah dan lancar, dekat dengan pelabuhan Pelindo, pelabuhan Perikanan, dan berseberangan dengan Pulau Rumpat. Namun terdapat permasalahan terkait pengembangannya antara lain Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pemeliharaan fasilitas di Bandar Bakau Kota Dumai. Lambatnya pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis evaluasi pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pariwisata, Pengelola Bandar Bakau Kota Dumai, Masyarakat Pengunjung dan Masyarakat sekitar Bandar Bakau Kota Dumai. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu Evaluasi pengembangan pariwisata bandar bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurang tersedianya sarana kebersihan, kurang terjaganya kebersihan di lokasi Bandar Bakau, serta tidak lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kebersihan serta kurangnya kerja sama antara pemerintah, pengelola, dan perusahaan dalam pengembangan pariwisata di Bandar Bakau. Adapun faktor penghambat dalam evaluasi pengembangan pariwisata bandar bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, antara lain kesadaran terhadap kebersihan dan tidak adanya wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata disebabkan oleh tidak ada regulasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengembangan, Pariwisata

**EVALUATION OF BANDAR MANGANG TOURISM DEVELOPMENT BY
THE DEPARTMENT OF YOUTH, SPORTS AND TOURISM
DUMAI CITY**

By :

Roja Maulana Ibrahim

Dumai City has a mangrove forest area of Bandar Bakau which is recorded with an area of 31 hectares. The Bandar Bakau Dumai area is in a very strategic location, close to the city center, the road to the location is good so access is easy and smooth, close to the Pelindo port, fishing port, and opposite Rupert Island. However, there are problems related to its development, including the lack of attention from the Dumai City Government, in this case the Youth, Sports and Tourism Office in maintaining facilities at Bandar Bakau Dumai City. The slow development of Bandar Bakau tourism by the Dumai City Government. The objective of this research is to analyze the evaluation of Bandar Bakau tourism development by the Dumai City Youth and Sports Tourism Office and its obstacles. The methods used are descriptive and qualitative methods; The informants in this study were the Head of Tourism, Managers of Bandar Bakau Dumai City, Visitor Community and Communities around Bandar Bakau Dumai City. Data collection techniques are observation and interviews. The results of the study, namely the evaluation of the development of mangrove tourism by the Department of Youth, Sports and Tourism of Dumai City, have not been carried out properly. This is due to the unavailability of cleaning facilities, the lack of cleanliness at the Bandar Bakau location, as well as incomplete facilities and infrastructure supporting cleanliness and the lack of cooperation between the government, managers, and companies in tourism development in Bandar Bakau. The inhibiting factors in evaluating the development of mangrove tourism by the Dumai City Youth Sports and Tourism Office, include awareness of cleanliness and the absence of local government authority in managing tourism due to the absence of regulations.

Keywords: Evaluation, Development, Tourism

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Seiring dengan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah, baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menjawab tuntutan yang semakin deras akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) dan desentralisasi kewenangan, hal itu diwujudkan dengan adanya Otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandirinannya, bahkan bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar setiap daerah mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai akibat dari akibat asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan dengan jalan mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Memasuki era reformasi, pemerintah melakukan pembaharuan demi pembaharuan yang bertujuan untuk lebih menjelaskan masyarakat. Ini dapat dilihat dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang selanjutnya berkembang menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip otonomi yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kota Dumai, bidang yang mengatur pengembangan objek wisata yaitu Bidang pariwisata pada Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kota Dumai. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijaksanaan, kegiatan usaha kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan untuk menjadi pertimbangan dalam hal pemberian rekomendasi atau izin usaha pariwisata;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan promosi publikasi pelayanan informasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pelaku-pelaku lain baik dalam lingkup nasional dan internasional;
- c. Penyiapan bahan rencana pengembangan usaha Objek dan Daya Tarik Wisata;
- d. Penyiapan bahan analisis rencana pengembangan pasar, penyuluhan pariwisata dan kegiatan bimbingan masyarakat.
- e. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
- f. Penyiapan pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kota Dumai merupakan satu diantara daerah otonom yang berkembang dengan baik di Provinsi Riau. Sumberdaya alam yang menjadi keunggulan Kota Dumai adalah bidang pertanian, perkebunan, perikanan, hidrokarbon dan mineral. Keanekaragaman sumberdaya alam ini telah menjadikan Kota Dumai sebagai daerah industri dan perdagangan. Kedua sektor ekonomi ini telah menjadi tumpuan pembangunan daerah ini sejak lama. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Dumai juga telah mulai mengembangkan bidang pariwisata. Kunjungan wisata di Kota Dumai tiga tahun terakhir telah terjadi fluktuasi yang sangat berbeda. Berikut adalah jenis dan nama objek wisata di Kota Dumai :

Tabel I.1 Jenis dan Nama Objek Wisata di Kota Dumai

No	Jenis Wisata	Nama objek wisata
1.	Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Wisata Kota Dumai • Penangkaran Harimau • Kuala Sungai Dumai • Pantai Teluk Makmur • Hutan Senepis • Pantai Purnama • Hutan Wisata • Pesona Bakau Seludung • Pantai Peranginan Puak • Hutan Bakau Masyarakat Adat Usaka Alam
2.	Wisata Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> • Pesanggrahan Putri Tujuh • Makam Pawang Lion • Makam Keramat Datuk Delau • Peligi Tuk Kurus • Batu Telapak Harimau Sakti • Keramat Cengai Sakti • Makam Tuk Kedondong Makam Tuk Syech Umar
3.	Wisata Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Persulukan Naqsabanriyah • Klenteng Hoch Liongkiong • Masjid Raya Dumai
4.	Wisata Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Golf Bakau Cevron • Lapangan Golf PTGC • Kolam Renang Simanalagi • Kolam Renang Bakau Datuk • Kolam Pancing Patra • Kolam Pancing Idola
5.	Wisata Tirta	<ul style="list-style-type: none"> • Taman Wahana Tirta • Taman Mina Patra Expresinisme Spritual Endong
6.	Wisata Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • Dekranasda Kota • Wisata Kuliner Ombak • Rumah Makan Dan Restoran

Sumber : *Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai (2021)*

Berdasarkan data diatas, menunjukkan Kota Dumai memiliki objek daya tarik wisata yang berpotensi. Salah satu objek wisata yang memiliki potensi besar adalah Bandar Bakau. Selain sebagai salah satu upaya penyelamatan lingkungan,

Bandar Bakau juga menjadi tempat wisata khusus yang menarik dan nyaman bagi wisatawan untuk menikmati alam setelah jenuh dengan padatnya rutinitas sehari-hari.

Secara ekologis, hutan bakau atau mangrove mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai daerah asuhan dan pemijahan dari berbagai organisme laut seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan. Hutan mangrove berperan sebagai pelindung pantai dari bahaya tsunami, penahan erosi dan perangkap sedimen, pendaur hara, menjaga produktivitas perikanan, peredam intrusi air laut, penyangga kesehatan, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang ekosistem pesisir lainnya. Ekosistem mangrove merupakan penopang ekosistem pesisir lainnya karena mempunyai saling keterkaitan, terutama ekosistem lamun dan terumbu karang.

Kawasan ekowisata mangrove Bandar Bakau Dumai memiliki luas 31 Ha dan yang baru dikelola 13 Ha, berada di Kuala Sungai Dumai. Kawasan Bandar Bakau Dumai, awalnya merupakan kawasan pengembangan Pelindo. Dengan terbitnya tiga aturan perundang-undangan telah mempertegas status lahan ekowisata mangrove Bandar Bakau Dumai sebagai Hutan Produksi Terbatas. Ketiga aturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, yang merupakan bentuk turunan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Riau.

Potensi objek dan daya tarik wisata di Bandar Bakau Dumai terutama bersumber dari kekayaan vegetasi mangrove. Dijumpai sebanyak 17 jenis mangrove sejati, yaitu: *Avicennia marina* (api-api jambu), *Avicennia alba* (api-api putih), *Bruguiera gymnorhiza* (tumu), *Bruguiera parviflora* (lenggadai), *Ceriops tagal* (tengar), *Heritiera littoralis* (dungun), *Lumnitzera littorea* (teruntum, sesop merah), *Lumnitzera racemosa* (susup, teruntum bunga putih), *Nypa fruticans* (nipah), *Rhizophora apiculata* (bakau, bakau kecil, bakau putih), *Rhizophora mucronata* (bakau, belukap, bakau kurap), *Rhizophora stylosa* (bakau, bakau merah), *Scyphiphora hydrophyllacea* (cingam), *Sonneratia alba* (prepat), *Sonneratia ovata* (kedabu), *Xylocarpus granatum* (nyirih) dan *Acrostichum* sp (piai). Penelitian Asbullah (2020) juga menemukan sebanyak 22 jenis mangrove asosisasi di Bandar Bakau Dumai meliputi *Akasia mangium* (akasia), *Calophyllum inophyllum* (gurah), *Cerbera manghas* (bintan, buta-but), *Clerodendrum inerme* (kayu tulang, keranji), *Derris trifolia* (tuba laut), *Ficus microcarpa* (beringin, kayu ara), *Flacourtia rukam* (rukam), *Flagellaria indica* (rotan dini, rotan tikus), *Gymnanthera paludosa* (kacang-kacang, kacang laut) *Hibiscus tiliaceus* (waru), *Ipomea pes-caprae* (katang-katang, daun barah), *Melastoma cadidum* (senduduk), *Morinda citrifolia* (mengkudu), *Pandanus tectorius* (pandan laut), *Pandanus odoratissima* (pandan tikar), *Sesuvium portulacastrum* (rumput gelang), *Spinefex littoreus* (gulung-gulung), *Stachytarpheta jamaicensis* (ekor kuda), *Terminalia cattapa* (ketapang), *Thespesia populne* (waru laut), *Vitex pubescens* (leban kampung), dan *Wedelia biflora* (serunai laut).

Vegetasi mangrove memiliki keunikan, dimana mangrove hanya hidup pada habitat berlumpur dan sangat dipengaruhi oleh air pasang surut dan kadar garam. Dengan struktur perakaran beragam: a) akar pasak/akar napas (*pneumatophores*), b) akar lutut (*knee-roots*), c) akar tunjang (*stilt -roots*), d) akar papan (*plank-roots*), e) akar gantung (*aerial-roots*); dan g) akar banir (*buttress*), telah membedakan vegetasi mangrove dengan tumbuhan lain yang hidup di daratan (Mulyadi, 2017). Penampilan perakaran demikian, selain bentuk adaptasi dari tumbuhan mangrove, juga telah menjadi daya tarik bagi pengunjung hutan mangrove untuk mengeksplornya. Rerimbun pepohonan mangrove juga membuat udara menjadi sejuk dan nyaman untuk berlindung berada di bawah naungannya. Kebutuhan akan udara bersih dan jauh dari keramaian menjadi pilihan suasana nyaman yang dicari oleh pengunjung di sekitar ekosistem mangrove.

Saat ini kegiatan pariwisata dikembangkan dan diarahkan pada upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan metode kaidah-kaidah penyelamatan lingkungan yaitu dengan ekowisata. Dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan wisata yang ramah lingkungan, sehingga kelestarian ekosistem tetap terjaga. Ada 5 (lima) program yang dilaksanakan LSM PAB dalam mempertahankan kawasan ekosistem mangrove Bandar Bakau Dumai:

1. Sekolah Alam Bandar Bakau;
2. Bank Mangrove;
3. Aksi bersih sungai dan pantai;
4. Aktivitas masyarakat berbasis lingkungan, dan

5. Eksplorasi kawasan konservasi menjadi destinasi wisata (ekowisata mangrove)

Secara ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara wilayah pada lahan atas atau daratan dan kawasan laut. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut merupakan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan pada lahan atas, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman, dan sebagainya. Demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan di perairan laut, seperti pengeboran minyak dan transportasi laut.

Secara ekologis, hutan mangrove mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai daerah asuhan dan pemijahan dari berbagai organisme laut seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan (Zamora, 1987). Hutan mangrove berperan sebagai pelindung pantai dari bahaya tsunami, penahan erosi dan perangkap sedimen, pendaur hara, menjaga produktivitas perikanan, peredam *intrusi* air laut, penyangga kesehatan, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang ekosistem pesisir lainnya. Ekosistem mangrove merupakan penopang ekosistem pesisir lainnya karena mempunyai saling keterkaitan, terutama ekosistem lamun dan terumbu karang.

Kota Dumai memiliki kawasan hutan mangrove "Bandar Bakau" yang tercatat dengan luas 31 Ha. Kawasan Bandar Bakau Dumai ini lokasinya sangat strategis, dekat dengan pusat kota, jalan menuju lokasi sudah bagus sehingga aksesnya mudah dan lancar, dekat dengan pelabuhan Pelindo, pelabuhan Perikanan, dan berseberangan dengan Pulau Rupa. Berikut merupakan data objek

wisata yang ada di Kota Dumai. Berikut tabel jumlah kunjungan wisatawan di Bandar bakau Kota Dumai.

Tabel 1.2 Jumlah pengunjung Bandar Bakau Kota Dumai Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah (orang)
1	2016	2119
2	2017	2090
3	2018	2415
4	2019	2070
5	2020	3080
Total		11893

Sumber: *Pengelola Bandar Bakau Kota Dumai (2021)*

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pengunjung yang ada di kawasan ekowisata mangrove Kota Dumai banyak, jumlah pengunjung mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Selain itu di Bandar Bakau ini terdapat pengunjung tetap yang merupakan murid-murid dari sebuah sekolah yang berada di Bandar Bakau ini yaitu “Sekolah Alam Bandar Bakau” yang setiap sekali dalam seminggu mengunjungi Bandar Bakau untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Layaknya sebagai kawasan wisata, Bandar Bakau Kota Dumai memiliki fasilitas- fasilitas Sebagaimana dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1.3 Fasilitas Di Bandar Bakau Kota Dumai

No	Fasilitas	Jumlah Unit
1	Track / jembatan susur pantai	1 unit
2	Balai pertemuan	2 unit
3	Balai keluarga / gazebo	6 unit
4	Wc umum/toilet	2 unit
5	Musholla	1 unit
6	Sekolah Alam	1 unit
7	Kantin	4 unit
8	Bank mangrove	1 unit
9	Rumah Adat “Melayu”	1 unit
10	Perpustakaan “Intanpayung”	1 unit

No	Fasilitas	Jumlah Unit
11	Halaman Parkir	1 unit
12	Pusat Informasi Mangrove	1 unit

Sumber: *Pengelola Bandar Bakau Kota Dumai, 2021*

Dari awal observasi peneliti menemukan fenomena terkait dengan strategi pengembangan objek wisata Bandar Bakau ini antara lain :

1. Fasilitas pendukung ini selain jumlahnya yang masih kurang jika dibandingkan dengan luas kawasan yang tersedia, kondisinya sebagian besar juga dalam kondisi tidak terawat dan memerlukan perhatian serius. Bahkan beberapa fasilitas pendukung yang mestinya ada, tapi belum dimiliki oleh Bandar Bakau Dumai. Demikian juga dengan fasilitas penunjang seperti toilet, mushalla, pusat informasi dan pusat cendera mata, jumlahnya belum memadai. Lapangan parkir baik untuk kendaraan roda dua maupun mobil seluas 20m x 20m masih perlu dilakukan pembenahan. Fasilitas penunjang lain seperti papan penunjuk arah, papan nama jenis mangrove dan teropong juga belum dijumpai di lokasi Bandar Bakau Dumai.
2. Terbatas pembiayaan dari pengelola sehingga lambatnya pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Pemerintah Kota Dumai. Masalah pembiayaan menjadi permasalahan tersendiri bagi pengelola tempat ekowisata mangrove Bandar Bakau Dumai. Sumber keuangan untuk pengelolaan Bandar Bakau Dumai berasal dari pendapatan sendiri, selain juga berasal dari donatur dan hasil kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Pendapatan sendiri diperoleh dari hasil penjualan

bibit mangrove dan penjualan tiket masuk kedalam kawasan ekowisata mangrove Bandar Bakau.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis merasa program pengembangan pariwisata Bandar Bakau belum bisa dilaksanakan secara efektif, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana : **“Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai”**.

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “bagaimana evaluasi pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

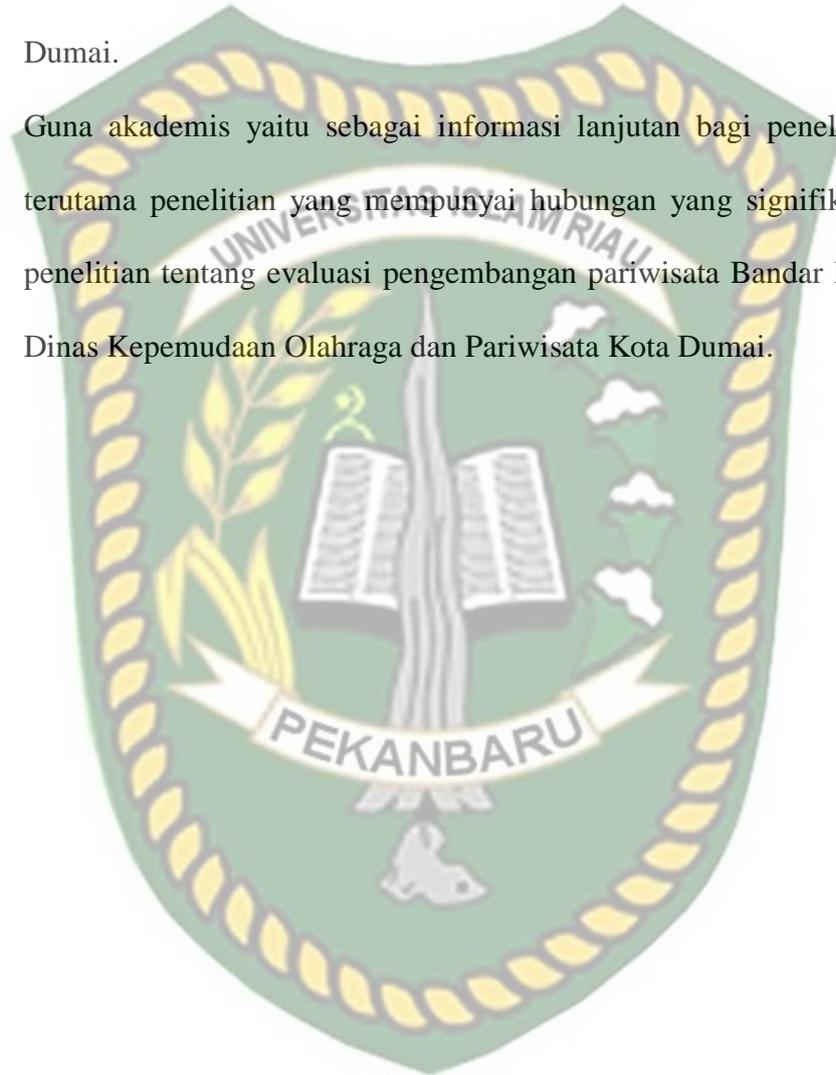
- a. Untuk menganalisis evaluasi pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam evaluasi pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

1. Guna teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah ilmu pemerintahan.

2. Guna praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi dalam evaluasi pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.
3. Guna akademis yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang evaluasi pengembangan pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
2. Indonesia memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada saat ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari pembedaan

terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalkan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*)

masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010:20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

b. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan

lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c. Urusan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya “urusan pemerintahan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dan dinyatakan dengan jelas, terdiri dari;

1. Urusan Absolut.

Urusan Absolut ini merupakan urusan yang menjadi kewenangan multak dari pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni; urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. (lihat pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrai dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut

pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

2. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama (sebelumnya disebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti yang diatur pada pasal 11 undang-undang nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjutnya dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas,
- b. Efisiensi,
- c. Eksternalitas
- d. Kepentingan strategis nasional

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi;

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keuruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diperkuat dan diperjelas pada pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah”.

d. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut dijelaskan asas-asas

penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi rangkaian artikel terkait pemerintahan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dimana dalam penjelasannya disebutkan :”yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “*penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas*

proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas “.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah, A dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

a. Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib Penyelenggara Negara

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan Umum

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

e. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

2. Kebijakan Pemerintahan

a. Pengertian Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna

menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat secara umum. (Dwiyanto, 2017:17)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah (Lubis, 2007;8).

Sedangkan menurut Nugroho (2004; 101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dalam Indiahono (2017:31) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program, Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seada-nya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa

percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edwar memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai

tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

3. Konsep Desentralisasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sesuai dengan pengertiannya, desentralisasi dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi.

Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah asas-asas yang dianut terdapat beberapa asas yaitu:

- a. Asas Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
- b. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

- d. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pada dasarnya konsep desentralisasi merupakan sebuah upaya dari pemerintah yang demokratis untuk memahami dan memberikan pelayanan yang tepat atas nilai-nilai yang terkandung dan hidup di suatu wilayah masyarakat daerah. Secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *de*=lepas dan *centrum*=pusat. Jadi desentralisasi adalah lepas dari (pemerintah) pusat. Istilah desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintah dimana menghasilkan pemerintah lokal di sana terjadi adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah. (Ni`matul Huda, 2009:61).

Dalam tatanan yuridis-normatif, undang-undang dasar negara republic Indonesia 1945 telah menentukan konsep Indonesia sebagai *Eenheidstaat* sehingga di dalamnya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat *staat*. Hal ini berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu: (Hari Sabarno, 2008:4)

1. Tidak dimilikinya kedautan yang bersifat semu keada daerah selayaknya dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal;
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional;

3. Penyerahan urusan tersebut direpresen tasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang bertumpu pada otonomi sangatlah mendasar bagi negara dengan sistem demokrasi, sistem demokrasi mempunyai prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” hal yang senada juga merupakan prinsip desentralisasi “masalah daerah, diselesaikan oleh daerah dan dengan cara daerah tersebut”. Hubungan demokrasi dengan desentralisasi bagaikan Ibu dan anaknya yang tidak dapat terpisahkan. Olehnya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki terhadap daerahnya sendiri karena dilibatkan secara aktif sejak awal, terutama dalam menyusun kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka. Tujuan dalam desentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat local;
- b. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah local;
- c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri;
- d. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Desentralisasi dianggap sangat menguntungkan Pemerintah Daerah yang diberikan otonomi. Daerah ini diberikan kebebasan dalam hukum dan ekonomi yang sebelumnya hanya merupakan wewenang pemerintah pusat. otonomi daerah

memungkinkan hukum dan peraturan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada pada daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu motor penggerak bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. (Keith Green, Munich Personal RePEc Archive, 2009:6)

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidaklah bersifat dikotomis namun kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi karena daerah yang memiliki otonomi yang mengandung kebebasan dan keleluasaan memerlukan bimbingan dari pemerintah pusat agar tidak menjelma menjadi kedaulatan. (Ni`matul Huda, 2009:67)

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi

kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan **mati hidupnya** suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”

(Danim, 2000:14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut

rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.

2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
(Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel II.1 Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

(Sumber: Dunn, 2003:610)

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk

ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Dwi Ernawatii dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Dwi Ernawatii, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

(Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
 12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;
- (Dalam Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan

terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

(Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu

tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).
(Dunn, 2003: 435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn: “Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”
(Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat

dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

5. Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996;99) Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu :

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.

2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.
3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru.
4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.
5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Menurut Inskeep (1991:38), di berbagai macam literatur dimuat berbagai macam komponen wisata. Namun ada beberapa komponen wisata yang selalu ada dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek wisata.

- b. Akomodasi Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.
- c. Fasilitas dan pelayanan wisata Fasilitas, ini dimaksudkan untuk semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk tour and travel operations (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya : restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi wisata, pelayanan pribadi (seperti salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum (termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran), dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai).
- d. Fasilitas dan pelayanan transportasi Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara.
- e. Infrastruktur lain, Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, telex, faksimili, dan radio). Elemen kelembagaan-Kelembagaan

yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan; menyusun strategi marketing dan program promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan penanaman modal bagi sector publik dan swasta; mengendalikan program ekonomi, lingkungan, dan sosial kebudayaan. komponen-komponen wisata tersebut dalam suatu hubungan keseluruhan dari lingkungan alami dan sosial ekonomi antara pasar internasional dan wisatawan domestik yang akan dilayani dan kawasan tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat atraksi, penyediaan fasilitas, pelayanan, dan infrastruktur.

Etika Perencanaan Suatu Kawasan Wisata. Syamsu, dkk (2001) mengatakan bahwa Perencanaan pengembangan suatu kawasan wisata memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan seperti: Marketing Research, Situational Analysis, Marketing Target, Tourism Promotion, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam promosi dan Marketing. Lebih lanjut dijelaskan, untuk menjadikan suatu kawasan menjadi objek wisata yang berhasil haruslah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor kelangkaan (*Scarcity*) yakni: sifat objek/atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain, termasuk kelangkaan alami maupun kelangkaan ciptaan

- b. Faktor kealamiahian (*Naturalism*) yakni: sifat dari objek/atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia. Atraksi wisata bisa berwujud suatu warisan budaya, atraksi alam yang belum mengalami banyak perubahan oleh perilaku manusia.
- c. Faktor Keunikan (*Uniqueness*) yakni sifat objek/atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan objek lain yang ada di sekitarnya.
- d. Faktor pemberdayaan masyarakat (*Communityempowerment*). Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dapat diberdayakan dengan keberadaan suatu objek wisata di daerahnya, sehingga masyarakat akan memiliki rasa memiliki agar menimbulkan keramah tamahan bagi wisatawan yang berkunjung.
- e. Faktor Optimalisasi lahan (*Areaoptimalisation*) maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata alam digunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar. Tanpa melupakan pertimbangan konservasi, preservasi, dan proteksi.
- f. Faktor Pemerataan harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar untuk kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung erta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta ketertiban masyarakat tuan rumah menjadi utuh dan padu dengan pengelola kawasan wisata.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti dan tahun penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan penelitian
1	2	3	4	5
1.	Regina Sari Bagit (2019)	Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang(Suatu Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya program yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari hak kepemilikan yang telah dibuat pembebasan lahan dari pemerintah desa, pemerintah Daerah, sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow diantaranya penataan ulang pelataran parkir bagi para pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan gazebo, toilet.	Perbedaan penelitian yaitu objek wisata yang diteliti Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas pengembangan pariwisata
2.	R.Aryo Pradipto S (2019)	Evaluasi Pengelolaan Objek Wisata Pasar Semarang Tinjomoyo Sebagai Pasar Wisata di Kota Semarang	Hasil penelitian memperlihatkan jika pasar dikelola dengan kurang baik. Terdapat beragam hambatan yang tidak segera diatasi, hambatan berasal dari faktor internal salah satunya sumber daya	Perbedaan penelitian yaitu objek wisata yang diteliti Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas

1	2	3	4	5
			manusia dan faktor eksternal yaitu cuaca.	pengembangan pariwisata
3.	La Ode Kadar (2020)	Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bahari Kabupaten Muna Di Sulawesi Tenggara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi pengembangan pariwisata bahari Kabupaten Muna melalui analisis evaluasi Context dan Mechanism dapat diperoleh Outcome : a) Kondisi tatakelola manajemen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Muna di bidang bahari sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah melalui dinas itu sendiri b) Beberapa program pengembangan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik itu program pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif telah berhasil dilaksanakan.	Perbedaan penelitian yaitu objek wisata yang diteliti Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas pengembangan pariwisata
4.	Data Wardana (2020)	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kampar pada objek wisata alam Teluk Jering dan hambatan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak ingin objek wisata ini dikelola oleh pemerintah karena ini akan mengurangi pendapatan bagi masyarakat lokal	Perbedaan penelitian yaitu objek wisata yang diteliti Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas pengembangan pariwisata

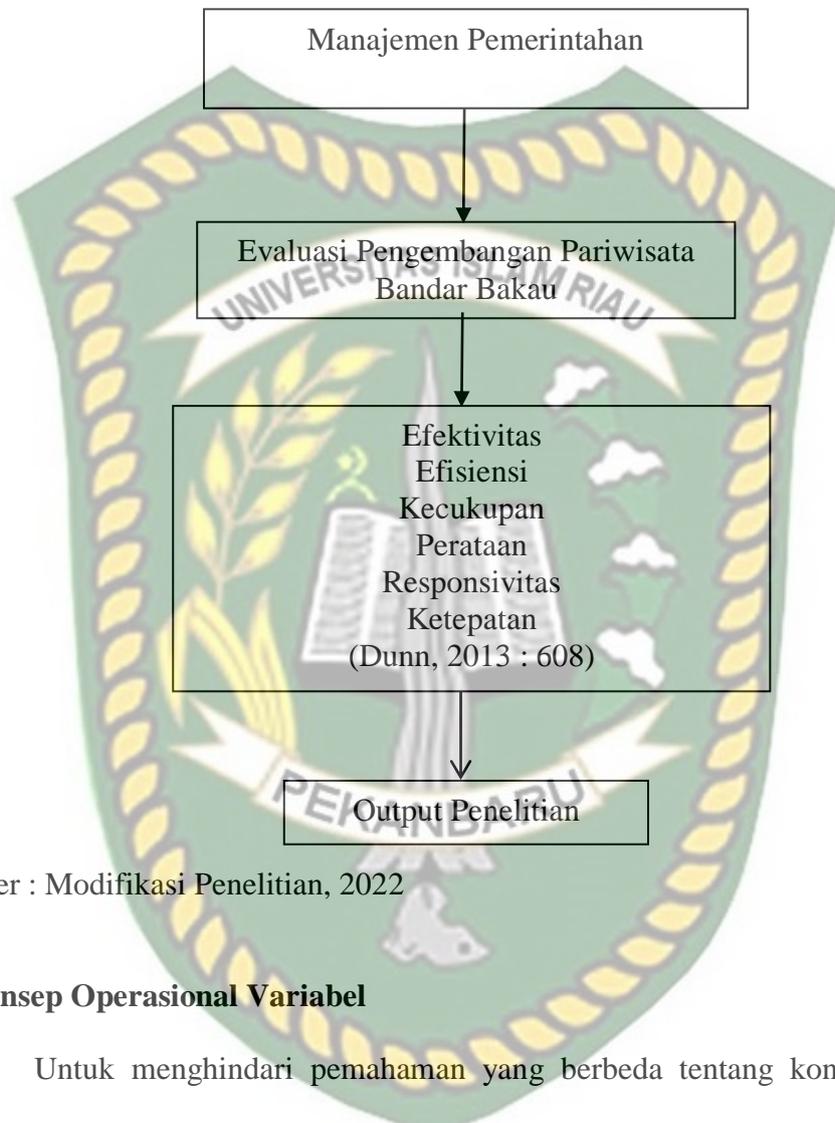
			tersebut dan belum adanya kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengembangan objek wisata.	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian **Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai** kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Pikiran Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2022

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.
2. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya

dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.

3. Efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
4. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
5. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
6. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
7. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
8. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Ukuran
1	2	3	4
Evaluasi adalah penafsiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan (Dunn, 2003:608)	Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	1.Efektivitas 2.Efisiensi 3.Kecukupan 4. Ketepatan 5. Responsivitas 6. Perataan	a. Diketuinya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait b. Diketuinya tindakan apa yang dikerjakan a. Adanya upaya pengembangan b. Adanya upaya mencegah hambatan dalam pengembangan a. Anggaran untuk pengembangan objek wisata b. Fasilitas yang memadai a. Program pengembangan yang tepat sasaran b. Melakukan pengawasan secara langsung a. Ikut berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata b. Mengikuti peraturan yang telah berlaku a. Mewajibkan pelaksanaan peraturan kepada semua pegawai b. Menetapkan sanksi bagi yang melanggar secara adil

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan key informant, yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2011;216)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Bandar Bakau Jl. Nelayan Laut Ujung, Budi Kemuliaan, Kota Dumai Provinsi Riau.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah *key informan*. *Informan* adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pariwisata.

Informan Tambahan adalah orang-orang yang berperan membantu dalam memberikan informasi tambahan tentang situasi dan kondisi penelitian. Yang menjadi informan tambahan pada penelitian ini adalah

1. Pengelola Bandar Bakau Kota Dumai
2. Masyarakat Pengunjung
3. Masyarakat sekitar Bandar Bakau Kota Dumai

Dalam penelitian ini *key informan* tersebut dijadikan sebagai perangkat informan dan informan selanjutnya ditentukan dengan metode *snow ball sampling* atau bola salju yaitu teknik penentuan sampel yang mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan satu orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel menjadi banyak (Sugiono, 2006 : 97).

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :
 1. Gambaran umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Adapun wawancara yang dilakukan dengan key dan informan. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka namun tetap pada koridor pertanyaan yang sudah di tetapkan, dimana yang diwawancarai diminta untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi terhadap pengalamannya.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Observasi dilakukan langsung kelapangan atau objek penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui masalah atau fenomena terkait dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Moleong (2014:103) ” menyimpulkan bahwa analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti mengolongkan data, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016:7), yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022																												Ket
		Desember				Januari				Februari				Mei				Juni				Juli								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x													
6	Penelitian Lapangan																			x										
7	Penelitian dan analisis data																			x	x									
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																							x						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																							x	x					
10	Ujian Skripsi																											x		
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																											x	x	
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penduduk Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari kota Pekanbaru. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km², sebelumnya Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokrowi. Namun semenjak Monokrowi pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Putri Tujuh, berasal dari kata di Lubuk dan Umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999, setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Saat ini Kota Dumai sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Dulu, Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi, berada di

pesisir Timur Provinsi Riau, Indonesia. Kini, Dumai yang kaya dengan minyak bumi itu, berubah menjadi kota pelabuhan minyak yang sangat ramai sejak tahun 1999. Kapal-kapal tangki minyak raksasa setiap harinya singgah dan merapat di pelabuhan ini. Kilang-kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadi Kota Dumai pada malam hari gemerlapan bak permata berkilauan.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa jaman penjajahan jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut:

1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kewadanan.
4. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
5. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kota Madya sehingga menjadi Kota Madya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 tahun 1999 maka Kota Madya Dumai berubah menjadi Kota

Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi. Didalam sejarah kota Dumai pernah menjadi kota paling luas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari, di Papua. Akan tetapi, semenjak Kota Manokwari tersebut pecah dan kemudian terbentuk Kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi kota terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil didaerah pesisir timur Provinsi Riau. Dan kini kota ini terus menggeliat, menjadi mutiara di pantai timur Pulau Sumatera. Kota Dumai juga dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, pengantin berseri adalah singkatan dari (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri) berseri (Bersih, Semarak, Rukun, dan Indah).

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 2010 (SP2010) penduduk Kota Dumai keadaan sampai tanggal 31 mei 2019 berjumlah 253.178 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dari hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) sebesar 3,54 persen. Pada tahun 2020 penduduk Kota Dumai berjumlah 280.027 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 145.356 jiwa dan

perempuan 134.671 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Dumai adalah sebesar 108. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat sekitar 108 orang laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk 2020 terhadap tahun sebelumnya sebesar 3,35 persen. Pemekaran kecamatan terjadi pada tahun 2019. Dalam tahun 2020, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Dumai Kota yaitu sebanyak 3.216 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Medang Kampai sebanyak 30 jiwa per km².

Kota Dumai berada di bagian pojok atas Provinsi Riau, dengan luas wilayah sebesar 3,51 persen dari total luas daratan Provinsi Riau dan berada di wilayah dataran pada ketinggian sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Letak astronomisnya berada antara 102°3'00"-102°4'23" Lintang Utara dan 101°23'37"-101°28'13" Bujur Timur.

1. Batas

Kota Dumai berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah utara : Selat Rupat
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir

2. Iklim

Selama tahun 2012 rata-rata suhu udara 28.32 oC dan terjadi hujan sebanyak 168 hari. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Agustus dengan 499

mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 18 hari. Sedangkan curah hujan terendah tercatat pada bulan Juni dengan 49 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 7 hari.

3. Geografis

Dilihat dari lokasi geografis wilayah, 33 kelurahan di Kota Dumai terletak di pesisir pantai dan pada daerah datar. Di wilayah kota Dumai terdapat 15 sungai dengan Sungai Buluala sebagai sungai terpanjang 40 km dan sungai Tanjung Leban sebagai sungai terpendek yaitu sepanjang 3 km. Kemudian pada tahun 2020 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Dumai yaitu antara lain :

1. Kecamatan Bakau Kapur
2. Kecamatan Medang Kampai
3. Kecamatan Sungai Sembilan
4. Kecamatan Dumai Barat
5. Kecamatan Dumai Timur
6. Kecamatan Dumai Kota
7. Kecamatan Dumai Selatan

4. Visi

Terwujudnya Kota Dumai sebagai pusat pelayanan “Pengantin” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism Dan Industri) yang “Berseri” (Bersih, Semarak, Rukun Dan Indah) dikawasan pantai timur sumatra sebagai penggerak kemajuan ekonomi dan budaya melayu yang agamis menuju Dumai Kota “Sehat” (Sejahtera, Harmonis, Aman, Tertib) pada tahun 2022.

5.Misi

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan yaitu sektor PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri)
- b. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta kemampuan dalam penguasaan teknologi dan keahlian spesifikasi yang dapat diandalkan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kualitas infrastruktur baik yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong perkembangan Kota Dumai menjadi Kota yang BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah).
- d. Mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah agar dapat tercipta pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih KKN serta beribawa dan mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif yang dapat mempeaskan masyarakat pada umumnya serta investor pada khususnya.
- e. Mengembangkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai dan Budaya tempatan guna memotivasi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan penyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu dan budaya tempatan.

6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai pada tahun 2020 terhadap tahun sebelumnya sebesar 3,35 persen. Jumlah kecamatan yang digunakan dalam penghitungan laju pertumbuhan penduduk adalah jumlah kecamatan pada saat tahun 2019 berjumlah tiga kecamatan. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Dumai terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di kecamatan Medang Kampai. Meningkatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai telah menyebabkan fungsi dan peran Kota Dumai dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam rangka tertib administrasi pemerintahan maupun dalam upaya untuk menampung gerak langkah pembangunan yang terus meningkat di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota memandang perlu dilakukan pemekaran wilayah.

B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud dengan pariwisata adalah sebagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri untuk berbagai kepentingan bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini sesuai dengan SOP dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mengembangkan diskusi objek wisata, seperti situs sejarah Danau Bunga Tujuh, Pantai Teluk Makkmur;
2. Mengembangkan potensi perdagangan serta kegiatan perekonomian daerah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan;
4. Meningkatkan mutu promosi pariwisata;
5. Meningkatkan kelestarian dan pengembangan budaya melayu;
6. Meningkatkan promosi pariwisata, kesenian, dan budaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Meningkatkan pengembangan apresiasi seni budaya;

- e. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
- f. Penyelegaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1. Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Dumai No.16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai sebagai berikut :

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkordinasi membina dan;
- c. Mengendalikan serta melaksanakan urusan kegiatan dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- 2) Perumusan kebijakan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;

- 4) Pengkoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan daerah kabupaten atau kota lain dan provinsi.

2. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kota Dumai

a. Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan gambarancitra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai secara konsisten, realistis, produktif serta kreatif dalam melaksanakan program.

Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumaimengacu pada Visi Kota Dumai, RPJP, RPJM serta Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebelumnya. Adapun Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai sebagai berikut :“Menjadi institusi yang handal dalam meningkatkan kunjungan wisata dan prestasi pemuda dan olahraga dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan agamis”

b. Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Untuk merealisasikan Visi Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai seperti tersebut di atas, dikembangkan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh pegawai, karena menjadi tanggung jawab bersama segenap komponen sesuai dengan proporsinya. Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumaiadalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumbert Daya Manusia yang professional dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran serta stakeholder dalam pengembangan pariwisata, pemuda dan olahraga.
3. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

3. Uraian Tugas Unit Kerja

Ruang lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Dumai di bagian operasional adalah sebagai berikut :

Kepegawaian pada Bidang Pemuda dan Olahraga meliputi :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan kesenian. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Kepala dinas mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan rencana strategis kota.
- 2) Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemuda, olah raga, pariwisata dan seni.
- 3) Perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan urusan kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan dan kesenian.
- 4) Pembinaan, pengawasandan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- 5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
- 6) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas dan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan renstra dinas.
- 2) Penghimpunan dan pengelolaan data penyusunan renstra dinas.
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum.
- 4) Penyusunan evaluasi dan laporan dinas.
- 5) Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat.
- 6) Penyelenggaraan urusan umum kepegawaian, rumah tangga dan asset dinas.
- 7) Pengelolaan keuangan dinas.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan kepala dinas.

c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas dan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan

yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi serta pelaporan.

- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- 4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- 5) Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi.
- 6) Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan rumah tangga yang lainnya.
- 7) Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas.
- 8) Penyusunan rancangan produk hukum dinas.
- 9) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang di berikan oleh sekretaris.

d. Kasubbag Keuangan

Kasubbag keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan dinas dan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan sub bagian.
- 3) Penyiapan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

d. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kepemudaan dan olahraga yang mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan
- 2) Mempersiapkan penyusunan rencana program pembinaan pemuda dan olahraga
- 3) Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga
- 4) Mengelola dan memfasilitasi sosialisasi bidang pemuda dan olahraga
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data di bidang pemuda dan olahraga
- 6) Melaksanakan kegiatan pemuda dan olahragag.
- 7) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan pemuda, produksi dan ketrampilanh.
- 8) Menyusun laporan kegiatan seksii.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

e. Kepala Seksi Pemuda

Kepala Seksi Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan pendataan, pembinaan organisasi/kelembagaan dan aktifitas kepemudaan, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan. Kepala Seksi Pemuda menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pendataan organisasi dan aktifitas pemuda di daerah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi dan aktifitas pemuda di daerah.
- 3) Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan kerjasama pemuda antar kabupaten/kota, antar propinsi dan antar negara.
- 4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda.

f. Kepala Seksi Olahraga

Kepala Seksi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan pendataan, pembinaan organisasi/kelembagaan dan aktifitas Olahraga, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Olahraga. Kepala Seksi olahraga menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pendataan organisasi dan aktifitas Olahraga di daerah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi dan aktifitas Olahraga di daerah.
- 3) Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan kerjasama event Olahraga antar kabupaten/Kota, antar propinsi. Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.

g. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengadaan dan peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan dan aktifitas Pemuda dan Olahraga di daerah.

h. Bidang Pariwisata

Kepala bidang pariwisata mempunyai tugas pokok melaksnaka urusanpemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pariwisata dan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan bidang kepariwisataan dan kesenian.
- 2) Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan kegiatan bidang.
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepariwisataan.
- 5) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan,penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan,verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan restoran dan pajakhiburan.
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 7) Melaksanakan tugas lain yang dibrikan oleh atasan

4. Produk dan Layanan

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah mengembangkan beberapaproduk/usaha. Respon dari masyarakat terus meningkat sehingga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus berupaya mengembangkan beragam produk seperti :

- 1) Usaha Penyedia Akomodasi
- 2) Usaha Jasa Pramuwisata

- 3) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 4) Usaha Kegiatan Hiburandan Rekreasi
- 5) Usaha Jasa Kawasan Pariwisata
- 6) Usaha Jasa Makan dan Minum
- 7) Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata
- 8) Usaha SPA
- 9) Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- 10) Usaha Daya Tarik
- 11) Usaha Jasa Hotel dan Restoran
- 12) Usaha Wisata Tirta
- 13) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 14) Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 15) Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga
- 16) Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga
- 17) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
- 18) Pelayanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Hiburan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Kota Dumai memiliki objek daya tarik wisata yang berpotensi. Salah satu objek wisata yang memiliki potensi besar adalah Bandar Bakau. Selain sebagai salah satu upaya penyelamatan lingkungan, Bandar Bakau juga menjadi tempat wisata khusus yang menarik dan nyaman bagi wisatawan untuk menikmati alam setelah jenuh dengan padatnya rutinitas sehari-hari.

Secara ekologis, hutan bakau atau mangrove mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai daerah asuhan dan pemijahan dari berbagai organisme laut seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan. Hutan mangrove berperan sebagai pelindung pantai dari bahaya tsunami, penahan erosi dan perangkap sedimen, pendaur hara, menjaga produktivitas perikanan, peredam intrusi air laut, penyangga kesehatan, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang ekosistem pesisir lainnya. Ekosistem mangrove merupakan penopang ekosistem pesisir lainnya karena mempunyai saling keterkaitan, terutama ekosistem lamun dan terumbu karang.

Kawasan ekowisata mangrove Bandar Bakau Dumai memiliki luas 31 Ha dan yang baru dikelola 13 Ha, berada di Kuala Sungai Dumai. Kawasan Bandar Bakau Dumai, awalnya merupakan kawasan pengembangan Pelindo. Dengan terbitnya tiga aturan perundang-undangan telah mempertegas status lahan

ekowisata mangrove Bandar Bakau Dumai sebagai Hutan Produksi Terbatas. Ketiga aturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, yang merupakan bentuk turunan implemetasi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Riau.

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429). Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Untuk menilai hasil pengembangan ekowisata, dari indikator efektifitas ini, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Bagaimanakah tanggapan bapak/ibu terkait dengan keindahan alam yang ada di Bandar Bakau?. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Saya rasa, untuk saat ini keindahan tepian mahligai sudah sangat baik, tempatnya yang tersembunyi di tengah rimbunnya pepohonan, serta suasana yang asri. Jadi Bandar Bakau sangat indah jika dilihat dari kondisi alam sekitarnya". (Syamsurizal, 2022)

Sementara itu, menurut Kepala bidang bina objek wisata dan pengembangan ekonomi kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka ditemukan bahwa:

"Dumai merupakan daerah yang memiliki banyak sekali potensi pariwisatanya, baik itu potensi wisata alam, budaya, maupun potensi wisata buatan. Jadi kalau wisata alam dipadukan dengan buatan manusia, tentu saja akan sangat memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama pada Bandar Bakau ini, karena kalau kita lihat, keindahan hutan mangrove yang tersembunyi di Bandar Bakau, ditambah dengan suasana alam yang masih asri dan hijau, menjadikan Bandar Bakau sangat indah untuk dipandang. (Heppi Suryani, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola Bandar Bakau, yang menyatakan bahwa:

"Bandar Bakau merupakan salah satu destinasi wisata yang perlu untuk dikembangkan, mengingat Bandar Bakau memiliki keindahan alam yang masih asri dan juga dikelilingi oleh berbagai jenis pepohonan yang masih terjaga dengan baik. Selain itu, jika kita berada pada Bandar Bakau, maka kita akan disuguhkan pemandangan hutan mangrove yang masih alami, pepohonan, serta satwa yang ada di sana, seperti burung, maupun hewan lainnya. (Tuk Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan instansi pemerintahan Kota Dumai, dan juga instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai beserta Kelompok Sadar Wisata, maka dapat dilihat bahwa potensi keindahan alam destinasi wisata Bandar Bakau sangatlah besar. Kondisi ini didukung oleh kondisi alam yang masih hijau dan alami, seperti dikelilingi oleh Hutan mangrove yang tenang, perbakauan yang ada di sekiling Bandar Bakau, serta pepohonan yang masih terjaga. Selain itu, ketika berada di Bandar Bakau, maka wisatawan bisa menemukan berbagai satwa serta suara burung yang berkicau indah.

Hasil wawancara dengan pihak pemerintahan tersebut juga sama dengan hasil wawancara dengan wisatawan serta masyarakat yang ada disekitar Bandar Bakau. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Suasana di Bandar Bakau ini sangatlah asri, mulai dari kita masuk area destinasi wisata ini, kita sudah disuguhi pemandangan yang indah, seperti pepohonan yang hijau, dan juga suasana yang asri dengan perpaduan kicauan burung serta suara hewan lainnya. Jika dilihat dari keindahan alamnya, maka Bandar Bakau sangatlah bagus untuk dikembangkan menjadi salah satu pusat destinasi wisata yang ada di Kota Dumai. Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. (Kartini, 2022).

Sementara itu, menurut wisatawan lainnya, mengakatan bahwa:

"Kalau untuk keindahan alam, Bandar Bakau ini sangatlah indah, lokasinya yang berada di cekungan atau sebetuk teluk, menjadikan air hutan mangrove yang ada di sini sangat tenang, ditambah lagi sekitar Bandar Bakau dikeliling bakau dan juga pepohonan yang rindang, menjadikan Bandar Bakau sangat cocok untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. (May Saroh, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka dapat dilihat bahwa wisatawan sangat mendukung untuk pengembangan Bandar Bakau sebagai salah satu destinasi wisata, karena ditopang oleh keindahan alam, dan juga kondisi alam yang masih terjaga dengan baik.

Pendapat yang disampaikan oleh wisatawan tersebut juga didukung oleh pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Kondisi alam disini sangat mendukung untuk kegiatan pariwisatanya, mulai dari lingkungan yang masih hijau, dengan berbagai pohon, suasana hutan mangrove yang tenang, dan juga udara segar daerah perbakauan yang sangat mendukung untuk pengembangan potensi wisata.(Taufik, 2022)

Sementara itu, menurut masyarakat lainya menyatakan bahwa:

"Saya sebagai masyarakat di sekitar sini sangat mendukung untuk pengembangan Bandar Bakau sebagai salah satu destinasi wisata, karena saya lihat disini keindahan alamnya sangat mendukung sekali untuk wisatawan berkunjung kemari, Bandar Bakau memiliki hutan mangrove yang tenang, aera yang dikelilingi oleh perbakauan, serta suasana yang masih terjaga. (Pak Udin, 2022).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Saya rasa pemerintah maupun instansi terkait harus benar-benar berusaha untuk mengembangkan potensi wisata di Bandar Bakau ini, mengingat Bandar Bakau sangatlah indah, dan suasana yang tenang dan alami. Kondisi ini bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Bandar Bakau. (Ali, 2022).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa seluruh instansi pemerintahan, maupun wisatawan dan element masyarakat sangat mendukung untuk pengembangan destinasi wisata Bandar Bakau. Kondisi ini didukung oleh kondisi alam yang indah, hutan mangrove yang tenang, lingkungan

perbakauan dan udara yang sejuk, serta di kelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan suasana yang asri.

Untuk menilai hasil pengembangan ekowisata, dari indikator aktraksi ini, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terkait dengan keindahan dari seni pertunjukkan masyarakat di Bandar Bakau? Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Saya kira Kota Dumai memiliki banyak potensi seni pertunjukan yang bisa dikembangkan pada setiap destinasi wisata, terutama pada destinasi wisata yang brada di Kota Dumai. Oleh kerana itu, kita selalu berusaha untuk menampilkan potensi wisata dari aspek seni pertunjukan, seperti seni pertunjukan khas Kota Dumai lainnya. Diharapkan dengan adanya kesenian ini dapat semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Bandar Bakau, selalin melihat keindahan hutan mangrove juga dapat melihat pertunjukkan musik". (Syamsurizal, 2022)

Sementara itu, menurut Kepala bidang bina objek wisata dan pengembangan ekonomi kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka ditemukan bahwa:

"Untuk dapat menjadi pusat wisata yang unggul, maka selain dari segi keindahan alam, juga harus diiringin dengan adanya seni pertunjukan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, sehingga semakin menarik minat turis untuk berkunjung ke daerah destinasi wisata. Untuk itu, saya selaklu berusaha berkoordinasi dengan berbagai element masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi wisata dan seni pertunjukan yang ada di Daerah Kota Dumai. (Heppi Suryani, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola Bandar Bakau, yang menyatakan bahwa:

"Selama ini, kita telah berusaha untuk menampilkan berbagai potensi seni pertunjukkan yang ada di Kota Dumai untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisawata di Bandar Bakau. Namun yang menjadi kendala kita dalam

pelaksanaan pertunjukan tersebut adakah kurangnya sarana untuk pementasan atau panggung yang digunakan untuk seni pertunjukan tersebut. Inilah yang perlu untuk dikembangkan di masa yang akan datang, jadi kita selalu berusaha untuk bekerja sama dengan berbagai instansi maupun perusahaan untuk mengembangkan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Bandar Bakau, terutama sarana pertunjukan, agar dapat menampilkan potensi wisata seni pertunjukan secara maksimal dan meningkatkan potensi kunjungan wisatawan ke Bandar Bakau. (Tuk Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak pemerintahan, maupun pihak desa, maka ditemukan bahwa untuk kegiatan seni pertunjukan masih belum terlaksana dengan baik, karena Bandar Bakau tidak dilengkapi dengan sarana pertunjukan seni yang memadai. Seharusnya Bandar Bakau dilengkapi dengan sarana dan prasarana pertunjukan seni budaya. Hal ini penting untuk menunjang potensi kesenian yang ada di Kota Dumai, agar semakin dikenal oleh wisatawan. Hasil wawancara dengan pihak pemerintahan tersebut juga sama dengan hasil wawancara dengan wisatawan serta masyarakat yang ada disekitar Bandar Bakau. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Saat ini Bandar Bakau tidak ada sarana hiburan, seperti pertunjukan, untuk kedepannya saya harap ada hiburan yang ditawarkan, untuk menunjang keindahan alam di sini, ya tentu saja harus ada pertunjukan kesenian daerah Kota Dumai sehingga lebih menarik dan banyak yang akan dilakukan di hutan mangrove ini. (Kartini, 2022).

Sementara itu, menurut wisatawan lainnya, mengakatan bahwa:

"Saya harap untuk kedepannya masyarakat pengelola, maupun pemerintah daerah setempat bisa melengkapi sarana hiburan di Bandar Bakau dengan seni pertunjukan yang menjadi ciri khas daerah Kota Dumai ini. Mengingat Kota Dumai memiliki banyak sekali potensi kesenian rakyat yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bandar Bakau. (May Saroh, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka dapat dilihat bahwa wisatawan merasa perlu untuk pengembangan seni pertunjukkan yang ada di Bandar Bakau, terutama seni pertunjukan khas Kota Dumai. Hal ini tentu saja akan semakin menarik wisatawan berkunjung ke Bandar Bakau. Pendapat yang disampaikan oleh wisatawan tersebut juga didukung oleh pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Kami sebagai masyarakat yang mengelolah Bandar Bakau ini tentu saja berkeinginan untuk mengembangkan potensi seni pertunjukan yang ada di Bandar Bakau. Namun, karena keterbatasan sarana yang dimiliki, seni pertunjukan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ya harapan kami kepada pemerintah maupun instansi terkait, perlu lah kiranya kita bekerja sama untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Bandar Bakau ini. (Taufik, 2022)

Sementara itu, menurut masyarakat lainya menyatakan bahwa:

"Saya rasa untuk kedepannya yang perlu dikembangkan adalah adanya seni pertunjukan yang diadakan di Bandar Bakau, agar semakin menarik bagi wisatawan berkunjung ke Bandar Bakau selain dari melihat hutan mangrove. (Pak Udin, 2022).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Saya rasa, kita harus bekerja samalah dengan berbagai instansi terkait, untuk pengembangan potensi pariwisata, terutama pada Bandar Bakau. Hal yang urgensi untuk dilakukan saat ini adalah dengan mengembangkan seni pertunjukan yang menjadi ciri khas daerah Dumai, agar kegiatan pariwisata di Bandar Bakau semakin menarik untuk dikunjungi. (Ali, 2022).

Berdasarkan pada hasil wawancara terkait dengan atraksi seni pertunjukan, maka diharapkan pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan seni pertunjukan yang ada di Bandar Bakau. Karena selama ini potensi wisata yang ada

di Bandar Bakau belum terlalu mengembangkan potensi seni pertunjukan, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Berdasarkan pada hasil wawancara terkait dengan sub indikator efektifitas, yaitu keindahan alam, dan juga seni pertunjukan, maka pemerintah daerah Kota Dumai, maupun pemerintah daerah Kota Dumai, harus bekerja sama untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki, terutama terkait dengan potensi wisata pertunjukan kesenian. Pengembangan potensi seni pertunjukan ini penting untuk menopang potensi wisata alam yang sudah ada.

Setiap destinasi wisata memiliki keunikan dan ciri khasnya untuk sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut, begitu pula dengan adanya kawasan Hutan Mangrove Bandar Bakau yang terletak di Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, kawasan ini merupakan pusat informasi Mangrove yang ada di Kota Dumai Bandar bakau memiliki luas wilayah 20 Hektar, hutan Mangrove Bandar Bakau dikelola oleh seorang Kepala Kelompok Sadar wisata yaitu Pak Darwis dan beserta anggotanya, untuk mengetahui suatu potensi objek wisata maka dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Bandar Bakau saat ini sudah memiliki pemandangan alam yang sangat indah, meliputi hutan mangrove yang tenang, suasana yang sejuk, dikelilingi daerah perbukitan, dan lingkungan yang masih asri dengan berbagai pohon serta satwa liar masih terjaga keasriannya. Namun yang menjadi permasalahan dan perlu untuk dikembangkan adalah terkait dengan seni pertunjukkan, karena saat ini, Bandar Bakau masih belum memiliki

seni pertunjukan yang bias meningkatkan jumlah pengunjung, misalnya ada pentas musik sehingga pengunjung menjadi lebih terhibur. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pertunjukan yang dimiliki oleh Bandar Bakau. Melihat kondisi tersebut, maka pengembangan potensi ekowisata yang ada di Bandar Bakau untuk masa yang akan datang adalah dengan menyediakan sarana pertunjukan untuk menampilkan kesenian khas Kota Dumai.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.

Untuk menilai hasil pengembangan ekowisata, dari sub indikator efisiensi, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Bandar Bakau? Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"saya rasa ketersediaan sarana dan prasarana tentu saja sangat mendukung potensi wisata yang ada di Bandar Bakau. Baik itu sarana dan prasarana yang memang harus ada di Bandar Bakau, maupun sarana penunjang lainnya, seperti, jalan menuju Bandar Bakau, akomodasi penginapan, maupun tempat makan. Jadi keseluruhan sarana dan prasarana itu harus dilengkapi, baik secara individu, maupun kelompok masyarakat". (Syamsurizal, 2022)

Sementara itu, menurut Kepala bidang bina objek wisata dan pengembangan ekonomi kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka ditemukan bahwa:

"Untuk saat ini, kita sudah berusaha untuk menyediakan berbagai sarana penunjang pariwisata di Bandar Bakau. Pemerintah juga telah berupaya melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan yang ada untuk menyalurkan dana, guna menunjang aktivitas pariwisata di Kota Dumai, terutama pada daerah Bandar Bakau ini. Seperti kerja sama yang kita lakukan dengan pihak lain untuk membangun jalan menuju Bandar Bakau dengan menggunakan dana anggaran. (Heppi Suryani, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh aparatur pengelola bandar bakau, yang menyatakan bahwa:

"Kalau kita lihat untuk akses ke lokasi Bandar Bakau memang sudah bagus, hal ini tidak terlepas dari bantuan pemerintah dan perusahaan Pertamina, dengan menggunakan dana perusahaan, namun untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di dalam Bandar Bakau, ini murni merupakan tanggung jawab dari penyedia akomodasi. Jadi pemerintah saat ini hanya menyediakan akses ke lokasi saja. (Tuk Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak pemerintahan, dan pemerintah desa, maka dapat dilihat bahwa saat ini, pengembangan potensi pariwisata yang ada di Bandar Bakau hanya sebatas pada penyediaan sarana dan prasarana menuju lokasi Bandar Bakau, sementara itu untuk ketersediaan sarana dan prasara di dalam Bandar Bakau, itu merupakan tanggung jawab dari pengelolah Bandar Bakau. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di dalam Bandar Bakau.

Saat ini pengelolah hanya menyediakan beberapa sarana penting saja, seperti mushallah, dan toilet umum, serta tempat parkir. Akan tetapi untuk beberapa sarana dan prasarana penunjang lainnya masih perlu untuk

dikembangkan. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Untuk kedepannya pihak pengelola seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepariwisataan di sini, misalnya pusat oleh-oleh maupun pusat makanan. (Kartini, 2022).

Sementara itu, menurut wisatawan lainnya, mengakatan bahwa:

"saya rasa yang perlu disediakan oleh pihak pengelola saat ini adalah terkait dengan kelengkapan sarana penunjang, seperti pusat oleh-oleh dan makananan, serta kalau bisa kita kembangkan lagi pusat penginapan di sini, agar wisatawan yang berkunjung tidak perlu keluar Bandar Bakau untuk menginap. (May Saroh, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka dapat dilihat bahwa wisatawan sangat mendukung untuk pengembangan Bandar Bakau sebagai salah satu destinasi wisata, namun Bandar Bakau harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang pariwisata, seperti akomodasi penginapan, pusat oleh-oleh dan tempat makan. Pendapat yang disampaikan oleh wisatawan tersebut juga didukung oleh pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa:

"sebagai pengelola masyarakat di sini tentu saja ingin memberikan yang terbaik kepada pengunjung, namun ini tentu saja harus bertahap, awalnya ktia menyediakan akomodasi penginapan dalam bentuk berkemah, nak sekarang kami sudah menyediakan penginapan dalam bentuk homestay.(Taufik, 2022)

Sementara itu, menurut masyarakat lainnya menyatakan bahwa:

"Kelengkapan sarana dan prasarana di sini masih kami kembangkan, salah satunya adalah dengan membangun gazebo-gazebo yang bisa disewa oleh wisatawan untuk beristirahat. (Pak Udin, 2022).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa:

"saat ini telah tersedia beraneka ragam masakan yang dijual di pusat makanan Bandar Bakau, namun kebanyakan dari wisatawan juga telah membawa bekal dari rumah. Jadi kita tidak bisa memaksakan wisatawan untuk makan dan membeli makanan di sini. Namun yang menjadi kendala kita saat ini adalah tidak adanya rumah makan yang ada di Bandar Bakau, khusus menyediakan menu khas daerah Dumai. (Ali, 2022).

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan masyarakat maupun dengan wisatawan, maka perlu bagi pengelola Bandar Bakau untuk mengembangkan potensi wisata di Bandar Bakau dengan menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang kegiatan wisatawan, seperti gerai oleh-oleh, rumah makan khas Dumai, penginapan dan sarana penunjang lainnya.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa Bandar Bakau memiliki beberapa akses atau kemudahan pencapaian ke Bandar Bakau, Bandar Bakau yang terletak di pusat Kota Dumai, tepatnya jarak yang ditempuh dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru sejauh 160 kilometer. Pada saat ini sudah terdapat berbagai fasilitas transportasi darat, udara maupun laut, adanya Bandara Pinang Kampai Dumai yang dikelola oleh PT. Pertamina yang sudah dapat digunakan wisatawan berbagai daerah termasuk daerah yang ada di Provinsi Riau dan luar Provinsi Riau, kemudian wisatawan dapat menggunakan jalur transportasi Laut yaitu menuju Pelabuhan Kota Dumai yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia (persero), dipelabuhan tersebut wisatawan dapat menggunakan ferry, Roro ataupun kapal perahu kecildan dapat dijangkau oleh jalur transportasi darat, bagi wisatawan yang menggunakan transportasi darat dan berasal dari dalam kota

dapat menempuh waktu sekitar 30 menit dari pusat kota, untuk wisatawan yang berasal dari luar kota Dumai dapat menggunakan jalur tol Trans Sumatera dari Pekanbaru-Dumai dengan menempuh jarak sekitar 2-3 jam dari Kota Pekanbaru.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Ketersediaan berbagai fasilitas pariwisata di suatu destinasi wisata merupakan keharusan dalam rangka memberikan berbagai pelayanan dan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung, berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti di lapangan, fasilitas penunjang pariwisata yang ada di Bandar Bakau, tujuan adanya fasilitas adalah untuk memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan sesuatu untuk memusahkan atau melancarkan pelaksanaan, jadi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam suatu pengembangan daya tarik wisata yang potensial harus memiliki fasilitas primer dan fasilitas penunjang (Andini, 2016).

Sebagai tempat wisata yang menerima jasa pelayanan bukan hanya pelayanannya saja yang harus diutamakan namun juga kebersihan wisata harus tetap dijaga demi kenyamanan customer. Kebersihan seringkali menjadi salah satu masalah yang mengganggu di kawasan wisata, yang awalnya customer bisa menikmati pemandangan yang indah tapi karena sampah keindahan tempat wisata

pun berkurang. Padahal setiap customer atau pengunjung menginginkan pelayanan terbaik dan memuaskan. Itu lah kenapa menjaga kebersihan di lingkungan wisata sangat penting agar pengunjung pun tidak komplain terhadap pihak pengelola. Seindah apapun view wisata tapi jika banyak sampah berserakan pasti akan mengurangi keindahan dan pastinya mengganggu kenyamanan setiap orang yang ada disana. Namun bukan hanya pihak pengelola wisata saja yang harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan setiap sudut area yang dikelolanya, pengunjung pun juga perlu ikut serta menjaga kebersihan. Untuk menilai pengembangan potensi pariwisata di Bandar Bakau, dilihat dari sub indikator kebersihan, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terkait dengan kebersihan lingkungan di Bandar Bakau?

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Kebersihan memang menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama bagi pengelola Bandar Bakau. Semakin bersih Bandar Bakau, maka pengunjung akan semakin betah, hal ini juga bisa meningkatkan rekomendasi kepada pengunjung lainnya untuk berkunjung ke Bandar Bakau. Namun di satu sisi pengunjung juga harus menjaga kebersihan lokasi Bandar Bakau. Untuk itu, di setiap tempat-tempat makan, dan juga sudut-sudut lokasi yang ramai wisatawan, kita menyediakan tempat sampah". (Syamsurizal, 2022)

Sementara itu, menurut Kepala bidang bina objek wisata dan pengembangan ekonomi kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka ditemukan bahwa:

"Kita selalu berusaha untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan Bandar Bakau, selain itu, kita juga memberikan

bantuan dalam bentuk tempat sampah, baik itu bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari program perusahaan. Namun secara umum penyediaan sarana kebersihan ini tentu saja menjadi tanggung jawab pengelolah, sementara itu pemerintah hanya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku masyarakat serta melakukan sosialisasi pentingnya kebersihan. (Heppi Suryani, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola Bandar Bakau, yang menyatakan bahwa:

"Kebersihan dan ketersediaan sarana kebersihan memang seutuhnya tanggung jawab dari pengelolah Bandar Bakau, kita pemerintah desa hanya memantau dan melakukan pengawasan saja, hal ini kita lakukan agar kebersihan di Bandar Bakau dapat terjaga. (Tuk Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan instansi pemerintahan Kota Dumai, dan juga instansi pemerintah daerah Kota Dumai beserta Kelompok Sadar Wisata, maka dapat dilihat bahwa sarana kebersihan yang ada Bandar Bakau saat ini masih kurang, terutama keberadaan tong sampah yang masih perlu dilengkapi di setiap sudut lokasi serta tempat-tempat keramaian, serta warung makan. Kekurangan sarana dan prasarana kebersihan pada akhirnya akan menyebabkan pengunjung membuang sampah sembarangan, akibatnya kebersihan Bandar Bakau menjadi kurang terawat. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Saya berharap pengelolah lebih memperbanyak tempat pembuangan sampah, agar mudah dijumpai dan pengunjung tidak buang sampah sembarang, sehingga kebersihan Bandar Bakau ini dapat terjaga dengan baik. (Kartini, 2022).

Sementara itu, menurut wisatawan lainnya, mengakatan bahwa:

"Saya lihat sampah masih berserakan di dalam Bandar Bakau, terutama pada hari-hari libur, hal ini terjadi karena tempat sampah tidak cukup,

terutama pada saat terjadi lonjakan pengunjung pada hari-hari besar.
(May Saroh, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka dapat dilihat bahwa wisatawan merasa kalau sarana kebersihan yang ada di Bandar Bakau masih minim dan belum mampu untuk menampung sampah pengunjung, terutama pada hari-hari besar, yang mana pada hari-hari tertentu jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Pendapat yang disampaikan oleh wisatawan tersebut juga didukung oleh pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Pada hari-hari tertentu memang banyak masyarakat yang berkunjung, akibatnya sampah juga meningkat, sementara jumlah tong sampah kita tetap, ya seharusnya pengunjung bersedia untuk menjaga kebersihan Bandar Bakau demi kenyamanan bersama." (Taufik, 2022)

Sementara itu, menurut masyarakat lain menyatakan bahwa:

"Memang sarana kebersihan kita masih kurang, akan tetapi saya harapkan kepada pengunjung juga kita bersama untuk sama-sama menjaga kebersihan Bandar Bakau, karena tanpa ada kesadaran kita bersama, Bandar Bakau ini tidak akan terjaga kebersihannya." (Pak Udin, 2022).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana dan juga tenaga kebersihan di Bandar Bakau masih kurang, sehingga untuk menjaga kebersihan di Bandar Bakau sangat dibutuhkan peran kita bersama, mulai dari pengunjung, maupun dari penjual makanan. Jadi kita semua harus bekerja sama untuk dapat menjaga kebersihan Bandar Bakau ini." (Ali, 2022).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa kebersihan di Bandar Bakau menjadi permasalahan saat ini, disebabkan oleh

kurangnya sarana dan prasarana penunjang kebersihan, serta kurangnya tenaga kebersihan yang dimiliki oleh Bandar Bakau. Oleh karena itu, untuk kedepannya, pemerintah maupun pengelola harus bekerja sama untuk mengembangkan potensi wisata di Bandar Bakau dengan cara menjaga kebersihan, seperti dengan menyediakan sarana kebersihan, petugas kebersihan dan lain sebagainya.

Untuk menilai hasil pengembangan ekowisata, dari indikator kelengkapan sarana dan prasarana ini, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terkait dengan kelengkapan sarana pendukung pariwisata di Bandar Bakau? Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Kelengkapan sarana dan prasarana di Bandar Bakau sangat penting untuk menunjang potensi wisata yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap tahunnya kita selalu berusaha untuk meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki di Bandar Bakau". (Syamsurizal, 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola Bandar Bakau, yang menyatakan bahwa:

"Pemerintah Desa selalu memberikan dukungan untuk pengembangan pariwisata, terutama di Bandar Bakau. Oleh karena itu, kita selalu berusaha untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melengkapi Bandar Bakau dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang, seperti akses jalan, penerangan, sarana MCK, dan akomodasi lainnya. (Tok Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan instansi pemerintahan Kota Dumai, dan juga instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai beserta Kelompok Sadar Wisata, maka dapat dilihat bahwa potensi keindahan alam destinasi wisata Bandar Bakau masih perlu mendapatkan perhatian dari segi kelengkapan sarana dan prasarana, agar pengunjung merasa betah untuk mengunjungi Bandar Bakau.

Hasil wawancara dengan pihak pemerintahan tersebut juga sama dengan hasil wawancara dengan wisatawan serta masyarakat yang ada disekitar Bandar Bakau. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Saya rasa pemerintah dan pengelola harus lebih melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Bandar Bakau, terutama terkait dengan akomodasi penginapan dan juga restoran. (Kartini, 2022).

Sementara itu, menurut wisatawan lainnya, mengakatan bahwa:

"Menurut saya, pemerintah dan pihak pengelola seharusnya lebih mengembangkan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sini, seperti sarana kebersihan, sarana penginapan, tempat makan, dan sebagainya. Hal ini penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau. (May Saroh, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pemerintah Kota Dumai, maupun dengan pengunjung, maka ditemukan bahwa: sarana dan prasarana yang ada di Bandar Bakau masih perlu untuk di sediakan secara lengkap, dijaga kebersihannya, dan dijaga kelengkapan sarana tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di Bandar Bakau adalah terkait dengan akomodasi penginapan, dan tempat makan. Karena selama ini masyarakat yang berkunjung ke Bandar Bakau, merasa sulit untuk menemukan penginapan dan juga rumah makan. Sehingga mereka terpaksa membawa bekal dari rumahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi diketahui diketahui banyak upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola hutan mangrove sehingga berharap adanya juga bantuan anggaran agar pengembangan ini dapat berjalan dengan baik, adapun fasilitas yang terdapat di objek wisata Hutan Mangrove Bandar Bakau paling

banyak yaitu balai keluarga dengan persentase 30% dan sudah memenuhi kriteria syarat fasilitas suatu destinasi wisata, yang terdiri dari fasilitas primernya yaitu kawasan Hutan Mangrove Bandar Bakau dan fasilitas penun-jangnya yang terdiri dari; rumah makan, restoran, toko cinderamata, balai pertemuan, balai keluarga, toilet umum, area parkir, rumah adat, mushola, bank mangrove, post tiket, tempat sampah, dan perpustakaan

4. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka

tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

Penilaian terhadap indikator ketepatan ini dapat dilihat dari sub indikator Sarana dan Prasarana Transportasi. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terkait dengan ketersediaan transportasi menuju Bandar Bakau?

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Kalau untuk kemudahan akses, mungkin kita masih perlu perbaiki, terutama untuk ketersediaan sarana transportasi. Karena saat ini tidak ada sarana transportasi yang bisa mengantarkan pengunjung dari jalan lintas Sumatera ke lokasi. Ya kalau tidak ada kendaraan pribadi akan sulit untuk akses ke Bandar Bakau. ". (Syamsurizal, 2022)

Sementara itu, menurut Kepala bidang bina objek wisata dan pengembangan ekonomi kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka ditemukan bahwa:

"Kalau untuk persoalan transportasi, kita sudah bukakan akses jalan menuju ke Bandar Bakau dengan menggunakan dana Pertamina, namun untuk ketersediaan sarana atau transportasi wisatawan itu menjadi wewenang dari pengelola Bandar Bakau. (Heppi Suryani, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola Bandar Bakau, yang menyatakan bahwa:

"Lokasi Bandar Bakau yang cukup jauh ke dalam, dari jalan lintas sumatera, menjadikan masyarakat harus menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke Bandar Bakau, hal ini disebabkan tidak adanya sarana transportasi yang langsung menuju Bandar Bakau kedepannya kita

berusaha untuk mengembangkan sarana transportasi yang bisa membawa wisatawan langsung ke lokasi Bandar Bakau. (Tok Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan instansi pemerintahan Kota Dumai, dan juga instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai beserta Kelompok Sadar Wisata, maka dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana transportasi menuju Bandar Bakau masih perlu untuk dikembangkan, mengat jarak antara jalan raya dengan lokasi yang masih jauh. Pengembangan ini tentu saja memerlukan dana, sehingga pemerintah harusnya lebih cermat lagi dalam menggunakan dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana transportasi menuju Bandar Bakau.

Hasil wawancara dengan pihak pemerintahan tersebut juga sama dengan hasil wawancara dengan wisatawan serta masyarakat yang ada disekitar Bandar Bakau. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu wisatawan yang berkunjung ke Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Lokasi objek wisata ini sangatlah bagus, namun perlu bagi pengelola untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi penunjang bagi pengunjung ke Bandar Bakau. (Kartini, 2022).

Sementara itu, menurut wisatawan lainnya, mengakatan bahwa:

"Saya rasa harus ada peran serta dari masyarakat maupun pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi, khususnya yang langsung menuju lokasi. Karena saat ini kalau tidak menggunakan kendaraan pribadi akan sulit menuju lokasi Bandar Bakau.. (May Saroh, 2022)

Pendapat yang disampaikan oleh wisatawan tersebut juga didukung oleh pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa:

"kalau untuk sarana transportasi dari jalan lintas memang belum terfikirkan untuk kami sediakan, karena selama ini kami lihat masyarakat

yang berkunjung ke sini rata-rata menggunakan kendaraan pribadi atau bus..(Taufik, 2022)

Sementara itu, menurut masyarakat lainya menyatakan bahwa:

"Untuk saat ini memang belum dikembangkan sarana transportasi khusus dari jalan lintas ke dalam menuju Bandar Bakau. Namun kedepannya mungkin kita akan menyediakan semacam alat transportasi, seperti odong-odong, atau delman, agar lebih memudahkan pengunjung. (Pak Udin, 2022).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Pengembangan sarana transportasi ini tentu saja sudah difikirkan, namun realisasinya terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan, jadi kalau ada bantuan pengembangan pariwisata, ya kami harapkan bisa membantu kamilah, semisalnya menyediakan kereta khusus menuju Bandar Bakau, atau menyediakan delman. (Ali, 2022).

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan berbagai pihak, maka dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana transportasi yang dikembangkan saat ini belum ada. Sehingga masyarakat yang ingin berkunjung ke Bandar Bakau harus menggunakan kendaraan pribadi atau bus. Oleh karena itu, penggunaan dana yang bisa digunakan oleh masyarakat, seharusnya digunakan untuk menyediakan sarana transportasi yang eksentrik menuju Bandar Bakau, seperti delman, atau kereta odong-odong. Keberadaan sarana transportasi ini diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi Bandar Bakau.

Hasil observasi diketahui bahwa fasilitas yang ada di Bandar Bakau dan standar fasilitas kawasan wisata, ternyata fasilitas di Bandar Bakau Kota Dumai masih sangat minim, terutama akses berupa jalan untuk menuju hutan bakau yang belum dalam keadaan baik dan lancar, melihat perkembangan Bandar Bakau

tersebut, seharusnya pihak pengelola lebih memperhatikan jumlah fasilitas yang ada yang tidak sesuaikan dengan jumlah pengunjung yang datang ke Bandar Bakau dengan jumlah fasilitas yang tidak cukup tentunya membuat sebagian pengunjung tidak bisa menikmati fasilitas yang ada.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Pelayanan tambahan harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. Ancillary juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah

kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, Tourist Information, Travel Agent dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan.

Untuk menilai hasil pengembangan ekowisata, dari indikator kerjasama ini maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut: Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola Bandar Bakau dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak? Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

"Kita berusaha untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan perusahaan yang ada di Dumai. Kerja sama dengan perusahaan ini penting untuk dapat memperoleh bantuan dalam bentuk dan juga rekomendasi destinasi wisata kepada perusahaan yang bisa dituju. Dengan adanya kerja sama tersebut, perusahaan bisa merekomendasikan kepada karyawannya untuk mengunjungi Bandar Bakau pada saat hari-hari libur". (Syamsurizal, 2022)

Sementara itu, menurut Kepala bidang bina objek wisata dan pengembangan ekonomoni kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka ditemukan bahwa:

"Pemerintah saat ini hanya sebagai jembatan yang mengakomodir kebutuhan pengembangan pariwisata dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti pemilik atau pengelola objek wisata, dengan perusahaan penyedia dan juga perusahaan penyedia jasa akomodasi perjalanan wisata. (Heppi Suryani, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola Bandar Bakau, yang menyatakan bahwa:

"Kita selalu membantu pengembangan potensi pariwisata Bandar Bakau, dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan perusahaan dan instansi, seperti sekolah. Dengan sekolah kita kerja sama untuk menjadikan Bandar Bakau sebagai objek wisata yang dituju pada hari-hari libur, begitu juga dengan perusahaan, selain mendapatkan

bantuan , kerja sama dengan perusahaan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bandar Bakau. (Tok Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan instansi pemerintahan Kota Dumai, dan juga instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai beserta Kelompok Sadar Wisata, maka dapat dilihat bahwa pengembangan pariwisata di Bandar Bakau dari aspek kerjasama dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintahan, serta perusahaan. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk mempermudah pengelola dalam mendapatkan bantuan, terutama bantuan untuk pengembangan pariwisata. Selain itu, kerja sama juga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bandar Bakau, karena perusahaan atau instansi pemerintah bisa merekomendasikan potensi Bandar Bakau ke masyarakat atau pegawainya.

Mangrove ini didapatkan dari Mangrove banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/ atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan, kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan tetapi juga untuk manusia (Ana, 2015).

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa, adanya koordinasi yang dilakukan dalam pengembangan objek wisata hutan mangrove ini, sehingga objek wisata ini semakin berkembang dan semakin diminati. Keindahan alam yang terdapat di kawasan Hutan Mangrove Bandar Bakau Kota Dumai tak kalah indah dibandingkan dengan keindahan alam yang terdapat di kawasan Hutan Mangrove daerah lain sehingga memberikan kesan yang berbeda dibandingkan dengan wisata alam lain yang berbentuk hutan, flora di kawasan ini sangat beragam dan

mewakili dari seluruh jenis mangrove yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari segi potensi wisata alam, Bandar bakau memiliki daya tarik wisata ; yaitu proses penanaman bibit yang dilaku-kan wisatawan, wisatawan yang ingin melakukan penelitian dan ingin melakukan program penanaman bibit. Tanaman bakau dapat membuat suasana sekitar menjadi indah terutama disaat malam hari adanya lampu-lampu yang dikaitkan antara pohon bakau satu ke pohon lainnya, tersedia nya hammock juga menjadi daya tarik wisata Bandar bakau. Pada kawasan hutan mangrove Bandar Bakau Kota Dumai, terdapat 14 jenis mangrove sejati.

6. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Menurut Aini (2019), daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama bagi pengembangan lingkungan di Kota Dumai, banyak lembaga sosial yang bergerak

di bidang lingkungan mensosialisasikan manfaat dari pohon bakau. Hal ini mendukung kesadaran masyarakat bahwa mangrove memang penting untuk melindungi lingkungan, selain itu berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa persepsi wisatawan terhadap kegiatan Sekolah alam di Bandar Bakau Kota Dumai.

Untuk menilai hasil pengembangan ekowisata, dari indikator penerimaan masyarakat, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Bagaimanakah pendapat bapak/ibu terkait dengan penerimaan atau antusiasme masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di Bandar Bakau dengan menggunakan dana Pertamina?. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, maka ditemukan bahwa:

“Kondisi fasilitas pengunjung yang tersedia di Ekowisata Mangrove di Bandar Bakau Kota Dumai kurang baik, karena kurang terkelola dan kurangnya perawatan kebersihan dari pihak pengelola. Untuk pemerintah, belum bisa membantu semaksimal mungkin dikarenakan tanah/ lahan bandar bakau masih berstatus dalam kepemilikan PT. Pelindo”. (Syamsurizal, 2022)

Sementara itu, menurut Kepala bidang bina objek wisata dan pengembangan ekonomi kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, maka ditemukan bahwa:

“fasilitas yang ada di Bandar Bakau dan standar fasilitas kawasan wisata, ternyata fasilitas di Bandar Bakau Kota Dumai masih sangat minim, melihat perkembangan Bandar Bakau tersebut, seharusnya pihak pengelola lebih memperhatikan jumlah fasilitas yang ada yang tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang ke Bandar Bakau dengan jumlah fasilitas yang tidak cukup tentunya membuat sebagian pengunjung tidak bisa menikmati fasilitas yang ada”. (Heppi Suryani, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola Bandar Bakau, yang menyatakan bahwa:

“Bandar Bakau adalah satu-satunya objek wisata yang berkawasan konservasi di Kota Dumai dan objek wisata ini sangat dekat dengan pusat kota, ini membuat pengunjung sangat berminat untuk mengunjungi wisata alam Bandar Bakau, Dumai juga Salah satu kawasan inidustri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni kawasan industri pelitung, untuk itu pentingnya dilakukan pengembangan objek wisata agar lebih berkembang dan lebih diminati masyarakat lagi”. (Tok Darwis, 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan instansi pemerintahan Kota Dumai, dan juga instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai beserta Kelompok Sadar Wisata, maka dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap program Pertamina sangat besar. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa bahwa program ini nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kemudian mayoritas tanggapan wisatawan terhadap kegiatan sekolah alam sangat baik, hal ini dikarenakan dengan adanya sekolah alam para siswa diajarkan tentang keadaan lingkungan pesisir pantai, mempelajari tentang jenis bakau, seperti apa bentuknya, dan bagaimana tanaman bakau tersebut tumbuh berkembang, termasuk berbagai jenis fauna yang terdapat di Bandar Bakau Kota Dumai, sekolah alam yang didirikan bertujuan agar generasi-generasi muda Kota Dumai ikut berpartisipasi serta peduli terhadap ke-berlangsungan hutan mangrove di Bandar bakau.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih banyak antusias masyarakat khususnya dari Kota Dumai maupun dari daerah lain yang datang berkunjung ke Bandar Bakau ini, hal ini bisa disebabkan keunikan dari objek

wisata yang diada, namun tetap program pengembangan harus dijalankan dengan baik sehingga akan semakin berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung objek wisata ini.

B. Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

Adapun faktor penghambat dalam evaluasi pengembangan pariwisata bandar bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, antara lain :

a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor kebersihan pariwisata

Permasalahan sampah merupakan sebuah masalah umum yang dihadapi setiap objek wisata. Kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan membuat lokasi objek wisata sulit terjaga keasriannya. Berbagai upaya telah dilakukan pihak pengelola mulai dari sosialisasi, menyediakan tempat sampah dan melakukan teguran. Kondisi serupa juga terjadi dikawasan objek wisata Bandar Bakau, kurangnya kesadaran dari wisatawan terkadang membuat pengelola kebersihan harus bekerja keras untuk membersihkan lokasi wisata yang tercemari sampah. Padahal lokasi objek wisata Bandar Bakau telah menyediakan rambu-rambu agar wisatawan membuang sampah ditempat sampah yang telah disediakan.

“Saya hanya melihat lebih kepada kesadaran pengunjung yang masih banyak membuang sampah disembarang tempat, padahal disana telah disediakan tempat sampah. Disana juga saya melihat telah dipasang tanda agar tidak membuang sampah disembarang tempat, karena akan berdampak kepada keindahan Bandar Bakau itu sendiri.” (Wawancara dengan Kartini, 2022)

Kawasan objek wisata Bandar Bakau telah dilengkapi fasilitas tempat sampah dan juga papan reklame agar wisatawan tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga kesadaran pengunjung menjadi prioritas utama agar lingkungan wisata Bandar Bakau tetap terjaga kebersihannya. Banyaknya sampah yang berserakan di objek wisata hutan mangrove.

Ide tidak hanya didaratan saja namun juga saat dipadati pengunjung hutan mangrove pun tercemari oleh sampah. Hal ini membuat pengelola menyediakan tempat sampah di setiap lokasi bahkan di hutan mangrove disediakan tempat sampah agar pengunjung tidak lagi mempunyai alasan untuk membuang sampah disembarang tempat.

“Pokok permasalahan yang banyak kami hadapi terkait kesadaran dari wisatawan mengenai sampah, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di hutan mangrove sehingga mencemari air. Untuk menanggulangi itu di setiap area telah kami pasang tempat sampah bahkan di hutan mangrove pun kami menyimpan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah disembarang tempat.” (Wawancara dengan Taufik, 2022)

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah disembarang tempat menjadi sebuah permasalahan besar yang dihadapi oleh pihak pengelola objek wisata Bandar Bakau. Langkah yang kemudian ditempuh oleh pengelola adalah dengan memasang tempat sampah di setiap kawasan Bandar Bakau.

Selain menyediakan tempat sampah pihak kebersihan juga telah melakukan koordinasi kepada pedagang agar menghimbau kepada setiap konsumennya untuk membuang sampah ditempat yang telah disediakan. Selain dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat para pelaku ekonomi dalam hal ini pedagang yang berjualan dikawasan hutan mangrove. Ide juga

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan teguran kepada pengunjung yang membuang sampah disembarang tempat. Terlebih kebanyakan sampah yang berserakan merupakan dagangan dari para pedagang.

“Pihak kebersihan telah berkoordinasi kepada kami terkait wisatawan yang membeli makanan ataupun minuman di tempat saya dan semua pedagang disini agar sampahnya tidak dibuang disembarang tempat, hal tersebut disampaikan kepada wisatawan agar kiranya mau untuk bekerjasama menjaga kebersihan.” (Wawancara dengan Ali, 2022)

Para pedagang yang berjualan dikawasan Bandar Bakau mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada setiap pengunjung yang membeli barang dagangannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk tetap menjaga kebersihan objek wisata Bandar Bakau.

Keindahan sebuah lokasi objek wisata harus didukung dengan cara pengunjung tidak membuang sampah disembarang tempat. Dengan cara tersebut keindahan sebuah objek wisata akan tetap terjaga. Kepedulian wisatawan terhadap lingkungan merupakan acuan utama, sehingga persoalan sampah hanya bisa terselesaikan jika semua pihak mampu untuk saling bekerjasama menjaga kebersihan.

“Masalah sampah memang seringkali menjadi masalah dalam sendi kehidupan, begitu pula lokasi wisata yang memang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi saya mengharapkan kepada setiap pengunjung untuk sama-sama menjaga lokasi wisata agar tetap bersih. (Wawancara dengan Syamsurizal, 2022)

Sampah yang berserakan merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya dibicarakan terutama tempat-tempat seperti objek wisata yang pada dasarnya didatangi oleh berbagai macam karakter manusia. Kesadaran

pengunjung merupakan sebuah pondasi utama agar lokasi objek wisata Bandar Bakau tetap terjaga kebersihannya.

b. Tidak adanya wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata disebabkan oleh tidak ada regulasi

Tata kelola wisata pada dasarnya harus didasari sebuah regulasi yang jelas, dimana pembagian keuntungan antara pemerintah daerah dan swasta sebagai pihak pengelola sudah melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi seperti ini adalah sebuah upaya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam pengelolaan objek wisata.

Kondisi tersebut berdampak kepada usaha pemerintah Kota Dumai dalam mempublikasikan daerahnya kepada masyarakat. Padahal sebagai sebuah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi tentu harus diimbangi dengan promosi wisatanya.

“Kegiatan pengelolaan Bandar Bakau yang tidak ada campur tangan pemerintah akan berdampak pada proses pengembangan wisata untuk menjadi sebuah destinasi wisata berbasis nasional. Pemerintah daerah wajib memperkenalkan potensi wisatanya kepada wisatawan diluar Kota Dumai. Namun hal ini belum bisa dilakukan karena terkendala belum adanya regulasi pemerintah dalam kegiatan pengelolaan objek wisata tersebut.” (Wawancara dengan Ali, 2022)

Masalah regulasi berdampak terhadap kegiatan publikasi pemerintah daerah Kota Dumai dalam mempromosikan potensi alam yang dimiliki daerahnya. Padahal di era modern seperti sekarang ini keberadaan objek wisata disuatu daerah merupakan sebuah tolak ukur maju atau tidaknya daerah tersebut. Persoalan tanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan pariwisata juga menjadi perdebatan dari tidak jelasnya regulasi dari pengelolaan objek wisata Bandar

Bakau. Termasuk keselamatan wisatawan dalam berwisata. Pemerintah daerah menyerahkan penuh tanggung jawab wisatawan kepada pihak pengelola yaitu :

“Sangat riskan memang jika kita melihat dalam rangka pengelolaan wisata itu tidak melibatkan pemerintah daerah. Jika terjadi masalah di lokasi wisata tersebut pasti yang akan disalahkan adalah pihak pengelola dan juga pemerintah. Namun pemerintah mau bertanggung jawab atas landasan apa jika objek wisata tersebut bukan wewenang dari pemerintah daerah.” (Wawancara dengan Tok Darwis, 2022)

Pemerintah daerah tidak ingin bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan dalam kegiatan wisata di Bandar Bakau, hal ini dikarenakan tidak adanya campur tangan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan objek wisata Bandar Bakau, sehingga tanggung jawab dilimpahkan sepenuhnya kepada pengelola.

Kegiatan pariwisata selain sebagai sebuah daya tarik untuk menarik pengunjung mendatangi sebuah daerah juga sebagai pendapatan bagi daerah. Tidak adanya keterlibatan pemerintah daerah Kota Dumai dalam pengelolaan wisata juga berdampak kepada pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

“Pada dasarnya memang sebuah kegiatan wisata dalam suatu daerah untuk meningkatkan pemasukan terhadap daerah. Namun karena wilayah Bandar Bakau masuk dalam wilayah pengelola jadi tidak ada keterlibatan pemerintah daerah didalamnya sehingga secara otomatis kegiatan pariwisata yang diharapkan untuk menambah pendapatan daerah itu menjadi terhambat.” (Wawancara dengan Syamsurizal, 2022)

Padahal pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Meninjau lokasi objek wisata Bandar Bakau yang masih merupakan bagian dalam structural wilayah pemerintah Kota Dumai secara administrative tentu keterlibatan pemerintah daerah dipandang

sangat perlu. Sehingga untuk mencapai kesepakatan tersebut harus ada kesepakatan dari pihak swasta dan pemerintah daerah.

“Dinas Pariwisata seharusnya terlibat dalam kegiatan pengelolaan, terlebih lokasi wisata Bandar Bakau masih merupakan bagian dari pemerintah daerah Kota Dumai. Persoalannya sekarang jauh lebih bagus mana jika pemerintah yang melakukan pengelolaan atau pihak swasta. Saya pikir memang perlu dilakukan pengkajian yang mendalam.”
(Wawancara dengan Ali, 2022)

Permasalahan regulasi dalam pengelolaan objek wisata Bandar Bakau juga menjadi kontradiksi dikalangan masyarakat. Pemerintah daerah wajib mengelola sumber daya yang dimiliki namun dengan pertimbangan harus jauh lebih baik dari pengelolaan pihak swasta. Berdasarkan hasil wawancara lapangan terkait faktor yang menghambat Tata Kelola Pariwisata Bandar Bakau yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan regulasi yang tidak jelas terkait pengelolaan wisata. Kebersihan objek wisata menjadi prioritas utama agar kegiatan wisata dapat bertahan, sehingga para wisatawan dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata harus saling bersinergi menjaga lingkungan objek wisata Bandar Bakau. Selain itu persoalan regulasi terhadap pembagian tanggung jawab antara pemerintah Kota Dumai dan pengelola harus diperjelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya kegiatan industry pariwisata.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pemerintah, pemerintah desa, maupun terhadap masyarakat, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi pengembangan pariwisata bandar bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurang tersedianya sarana kebersihan, kurang terjaganya kebersihan di lokasi Bandar Bakau, serta tidak lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kebersihan serta kurangnya kerja sama antara pemerintah, pengelolah, dan perusahaan dalam pengembangan pariwisata di Bandar Bakau.
2. Adapun faktor penghambat dalam evaluasi pengembangan pariwisata bandar bakau oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, antara lain kesadaran terhadap kebersihan dan tidak adanya wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata disebabkan oleh tidak ada regulasi.

B. Saran

Adapun rekomendasi penelitian ini disampaikan kepada beberapa pihak, seperti:

1. Pengelolah

Bagi pengelolah, saran utama yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan adalah dengan menyediakan berbagai sarana dan

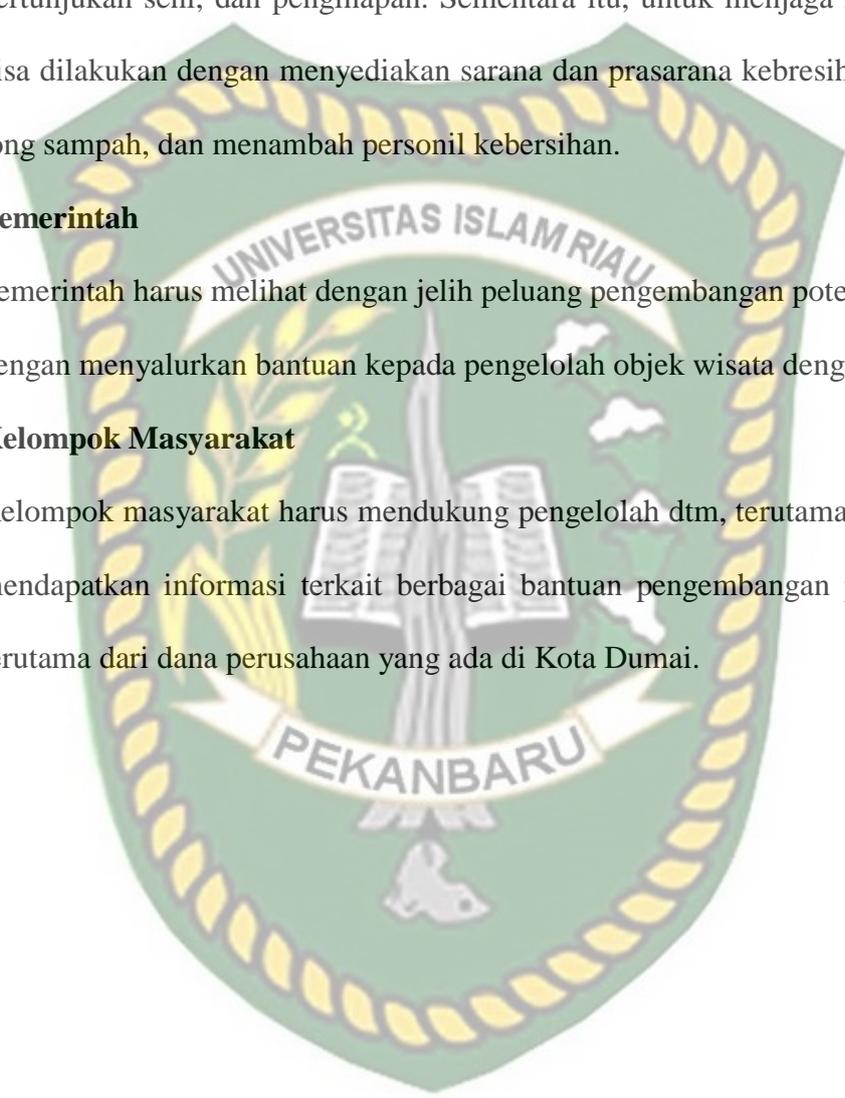
sarana penunjang wisata, serta menjaga kebersihan lokasi wisata. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun sarana penunjang, seperti restoran, panggung pertunjukan seni, dan penginapan. Sementara itu, untuk menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana kebersihan, seperti tong sampah, dan menambah personil kebersihan.

2. **Pemerintah**

Pemerintah harus melihat dengan jeli peluang pengembangan potensi wisata, dengan menyalurkan bantuan kepada pengelola objek wisata dengan tepat.

3. **Kelompok Masyarakat**

Kelompok masyarakat harus mendukung pengelola dtm, terutama dalam hal mendapatkan informasi terkait berbagai bantuan pengembangan pariwisata, terutama dari dana perusahaan yang ada di Kota Dumai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A.W.Widjaja. 2004. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Edy Soekarno, 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediatera.
- Gibson, James,L. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, H., dan Pramudyanto, B. 2007. *Pengawasan Dalam Pengendalian*. Jakarta: Granit.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPF, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.

- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephen P. Robin, 2000, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta
- Sugiono, Dr., Prof., 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*., Alfabeta, Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 2007. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.*” Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Preses*. Yogyakarta: Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zulkifli, 2009, *Fungsi-fungsi Manajemen Suatu Bacaan Pengantar*, Buku Ajar, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Peraturan Perundang-undangan

UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau